




**KEMENTERIAN PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA**



**PERIODE 06 JULI 2023**



Title	Peneliti Ingatkan Kerawanan Pangan akibat Perubahan Iklim	 Kementerian Pertanian
Date	6 Juli 2023	
Media	Koran Jakarta	
Page	12	
Author	SB/AFP/N-3	

## Dampak Pemanasan Global

# Peneliti Ingatkan Kerawanan Pangan akibat Perubahan Iklim

PARIS - Dalam penelitian yang diterbitkan di *Nature Communications*, para peneliti di Amerika Serikat (AS) dan Jerman melihat kemungkinan beberapa daerah penghasil makanan utama secara bersamaan dapat mengalami hasil yang lebih rendah.

"Peristiwa ini dapat menyebabkan kenaikan harga, kerawanan pangan, dan bahkan gelombang sipil," kata penulis utama studi, Kai Kornhuber, peneliti dari Universitas Columbia dan Dewan Hubungan Luar Negeri Jerman, Selasa (4/7).

Dari sebuah studi terbaru, para peneliti memperingatkan beberapa sentra gandum dunia telah meremehkan risiko gagal panen, yang menurut mereka harus menjadi seruan terhadap ancaman perubahan iklim terhadap sistem pangan global.

Dikutip dari *Agence France Presse* (AFP), produksi pangan merupakan sumber utama emisi pemanasan planet dan sangat terpapar pada dampak perubahan iklim, dengan model iklim dan tanaman yang digunakan untuk mencari tahu apa dampaknya saat pemanasan dunia.

"Dengan meningkatkan konsentrasi gas rumah kaca, kita memasuki udara yang belum dipetakan di mana kita berjuang untuk benar-benar memiliki gagasan yang akurat tentang jenis ekstrem apa yang akan kita tangani," katanya.

"Kami menunjukkan jenis acara yang bersamaan ini benar-benar diremehkan," tulisnya.



Seorang petani memegang jagung kerdil selama gelombang panas bulan Juni di Meksiko.

### Observasi Data

Studi tersebut mengamati observasi data dan model iklim antara tahun 1960 dan 2014, kemudian pada proyeksi untuk tahun 2045 hingga 2099.

Para peneliti pertamanya melihat jalur *jet stream* (arus udara yang sangat kuat) yang mendorong pola cuaca di banyak wilayah penghasil tanaman terpenting di dunia.

Mereka menemukan *jet stream*, mengalir dalam bentuk gelombang besar, memiliki dampak yang sangat signifikan pada wilayah pangan utama di Amerika Utara, Eropa Timur, dan Asia Timur, dengan pengurangan panen hingga 7 persen.

Para peneliti juga menemukan ini dikaitkan dengan panen yang gagal secara bersamaan di masa lalu.

"Salah satu contohnya adalah pada 2010, ketika fluktuasi *jet stream* dikaitkan dengan panas ekstrem di beberapa bagian Russia dan banjir dahsyat di Pakistan, yang keduanya merusak tanaman," kata Kornhuber.

Studi ini juga melihat seberapa baik model komputer menilai risiko ini dan menemukan bahwa meskipun mereka baik dalam menunjukkan pergerakan atmosfer dari aliran *jet stream*, mereka meremehkan besarnya dampak yang timbul di darat.

Kornhuber mengatakan penelitian ini harus menjadi "peringatan dalam hal keterlibatan kita" dari dampak perubahan iklim pada sektor pangan, dengan cuaca ekstrem yang lebih sering dan intens serta kombinasi ekstrem

yang semakin rumit.

"Kita perlu bersiap untuk risiko jenis iklim yang kompleks ini di masa depan dan model saat ini tampaknya tidak dapat ditangkap," katanya.

Pada Senin, Kepala Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Volker Turk, mengubah masa depan yang "benar-benar menakutkan" dari penderitaan karena perubahan iklim yang ekstrem melanda tanaman, ternak, dan ekosistem penting.

Dia mengatakan dalam debat PBB tentang hak atas pangan lebih dari 828 juta orang menderita kelaparan pada 2021 dan perubahan iklim dapat meningkat hingga 80 juta pada pertengahan abad, dan mengancam para pemimpin dunia karena hanya berpikir untuk jangka pendek. ■ SB/AFP/N-3

Dokumentasi

**BIRO HUMAS DAN INFORMASI PUBLIK  
KEMANTAN**

Title	Pemerintah Perlu Perkuat Intensifikasi Pertanian
Date	6 Juli 2023
Media	Koran Jakarta
Page	6
Author	Ers/E-10



## Kemandirian Pangan I

Impor Jagung Hanya Solusi Jangka Pendek

# Pemerintah Perlu Perkuat Intensifikasi Pertanian

Jika ingin serius menggarapnya, Indonesia mampu menciptakan swasembada pangan, terutama jagung, sehingga tak perlu lagi impor.

JAKARTA - Pemerintah, khususnya Badan Pangan Nasional (Bapanas), diminta menghentikan wacana impor jagung untuk kebutuhan pakan ternak. Usulan peternak membuka kran impor jagung sebagai buntut dari kenaikan harga pakan tidak mesti harus diterima. Perlu cari solusi lain sebagai wujud nyata komitmen pemerintah terkait kemandirian pangan.

Direktur Program Indef, Esther Sri Astuti, sangat menyayangkan wacana importasi jagung tersebut. Menurutnya, Indonesia mempunyai potensi besar dalam produksi jagung. "Masa, jagung saja kita harus impor. Padahal kalau mau serius mengupayakan swasembada pangan dalam hal ini jagung, saya rasa mampu," tegas Esther pada *Koran Jakarta*, Rabu (5/7).

Dari sejumlah riset, dia menyampaikan permasalahan pertanian selama ini meliputi produktivitas rendah disebabkan kurangnya pupuk, ketidaktahuan merawat secara benar, lahan tak luas, sarana prasarana kurang, teknologi pertanian kurang, modal kurang, harga pada saat panen rendah.

"Solusinya juga sudah jelas, yakni harus perbanyak produksi pupuk, dan sarana prasarana, usahakan bibit unggul dan teknologi pertanian serta program penyuluhan diperbanyak," ungkapnya.

Selain itu, lanjutnya, pemerintah perlu menggandeng perguruan tinggi dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) serta sektor swasta (perusahaan) untuk membantu penguatan *capacity building* dan menciptakan varietas unggul, menyediakan dana berupa *corporate social responsibility* (CSR). Dengan demikian, petani dapat meningkatkan produktivitas mereka.

"Sayangnya, upaya swasembada pangan belum serius karena ada banyak *rent seeker* (pemburu rente, red)," tegasnya.

Senada, Kepala Pusat Pengkajian dan Penerapan Agroekologi Serikat Petani Indonesia

(SPI), Muhammad Qomarunajmi, menolak importasi jagung. Menurutnya, impor tak bisa menjadi solusi jangka panjang kendati anggota SPI mencakup peternak dan konsumen jagung.

Dia mengatakan tren peningkatan kebutuhan jagung dan pangan yang lain mesti diiringi dengan peningkatan produktivitas. "Perlu dukungan kebijakan untuk diseminasi teknologi peningkatan produktivitas," tandasnya.

Dia mengungkapkan beberapa praktik baik di lapangan, yang terbukti bisa meningkatkan produksi, bahkan sampai 50 persen perlu dikembangkan dengan menyelenggarakan sekolah lapang untuk peningkatan kapasitas petani.

### Neraca Defisit

Seperti diketahui, Bapanas merespons usulan peternak unggas supaya kran impor jagung segera dibuka. Peternak

khawatir harga pakan kian meroket. Ini didasari oleh pasokan jagung yang diprediksi defisit pada semester II-2023.

Kepala Bapanas, Arief Prasetyo Adi, menyampaikan untuk bisa


melakukan impor diperlukan analisis dalam neraca pangan komoditas. "Bila hitungan neracanya minus, pengadaan luar negeri bisa sebagai alternatif," ujar Arief.

Data prognosa neraca jagung bulanan diperkirakan defisit pada Juli-Desember 2023. Pada Juli 2023, diperkirakan neraca jagung mengalami defisit 143.341 ton, pada Agustus 2023 defisit 34.059 ton, pada September 2023 defisit 139.091 ton, pada Oktober 2023 defisit 136.938 ton, pada November 2023 defisit 95.541 ton, dan pada Desember 2023 defisit 280.062 ton.

Di dalam Peraturan Presiden (Perpres) No 125/2022, jagung merupakan komoditas pokok yang diatur ketersediaannya sebagai cadangan pangan pemerintah (CPP) bersama beras dan kedelai.

« Masa, jagung saja kita harus impor. Padahal kalau mau serius mengupayakan swasembada pangan dalam hal ini jagung, saya rasa mampu. »

ESTHER SRI ASTUTI  
Direktur Program Indef

Title	KPK Telah Periksa 49 Pejabat dan ASN Kementan	 Kementerian Pertanian
Date	6 Juli 2023	
Media	Koran Jakarta	
Page	2	
Author	Ant/S-2	

A

## Kasus Korupsi KPK Telah Periksa 49 Pejabat dan ASN Kementan

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah meminta keterangan sebanyak 49 pejabat dan aparatur sipil negara (ASN) di Kementerian Pertanian (Kementan) terkait penyelidikan dugaan korupsi di kementerian tersebut.


“Untuk kebutuhan penyelidikan sudah mengundang, ya, untuk permintaan keterangan itu 49 (orang), baik itu pejabat, ASN di lingkungan Kementan, termasuk Pak Menteri (Syahrul Yasin Limpo),” kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu (5/7).

Ali menambahkan saat ini lembaga antirasuah sedang menganalisis keterangan para pihak tersebut dan mengumpulkan berbagai alat bukti lainnya. Apabila berdasarkan analisis ditemukan peristiwa pidana dan ditemukan orang yang bisa dipertanggungjawabkan secara hukum, maka hal tersebut akan ditindaklanjuti dengan meningkatkan proses penyelidikan ke tahap penyidikan.

KPK juga tak menutup kemungkinan kembali memanggil 49 orang tersebut apabila diperlukan demi proses penyelidikan yang sedang berjalan. “Kalau memang dibutuhkan kembali, ya, siapa pun dari 49 itu pasti akan kami undang kembali dalam konteks penyelidikan,” jelasnya.

Meski demikian, Ali mengatakan tidak banjar informasi yang bisa disampaikan kepada publik mengenai kinerja KPK di Kementan karena prosesnya masih dalam tahap penyelidikan.

“Ketika penyidikan, kami akan sampaikan ke masyarakat setiap perkembangan, karena masih proses penyelidikan tentu belum bisa kami sampaikan,” kata Ali. ■ **Ant/S-2**

Title	ERA NORMALISASI ELASTISITAS PAJAK	 Kementerian Pertanian
Date	6 Juli 2023	
Media	Bisnis Indonesia	
Page	11	
Author	Tegar Arief	

| INDIKATOR PENERIMAAN PAJAK |

# ERA NORMALISASI ELASTISITAS PAJAK

Peralihan dari pandemi menuju endemi nyatanya tak hanya memberikan kabar baik bagi masa depan ekonomi nasional. Pada saat yang sama, situasi ini pun akan menurunkan elastisitas penerimaan pajak terhadap pertumbuhan ekonomi alias *tax buoyancy*.

Tegar Arief  
tegararief@bisnis.com



### Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2023

Lembaga	%
IMF (Mei 2023)	5
World Bank (April 2023)	4,9
ADB (April 2023)	4,8
Konsensus Bloomberg (April 2023)	4,9
OECD (Maret 2023)	4,7
APBN 2023	5,3
Bank Indonesia	4,5-5,3

Elastisitas penerimaan pajak terhadap PDB pada tahun ini menghadapi tantangan karena aktivitas ekonomi yang menghadapi berbagai ketidakpastian.



### Performa APBN 2023 Per Mei (Rp Triliun)

Uraian	Realisasi	% APBN	Pertumbuhan (% YoY)
<b>PENDAPATAN NEGARA</b>	<b>1.209,3</b>	<b>49,1</b>	<b>13,0</b>
Perpajakan	948,7	46,9	12,2
Pajak	830,3	48,3	17,7
Bea & Cukai	118,4	39,0	-15,6
PNBP	260,5	59,0	16,2
<b>BELANJA NEGARA</b>	<b>1.005,0</b>	<b>32,8</b>	<b>7,1</b>
Pemerintah Pusat	714,6	31,8	9,3
K/L	326,2	32,6	2,2
Non-K/L	388,4	31,2	16,0
Transfer ke Daerah	290,3	35,6	2,1
<b>KESEIMBANGAN PRIMER</b>	<b>390,5</b>	<b>-249,1</b>	<b>30,7</b>
<b>SURPLUS/(DEFISIT)</b>	<b>204,3</b>	<b>-34,2</b>	<b>54,8</b>
% terhadap PDB	0,97	-	-
<b>PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>118,4</b>	<b>19,8</b>	<b>41,6</b>

SUMBER: KEMENTERIAN KEUANGAN, DISIPLIN

**T**ax buoyancy adalah skema perpajakan yang ditungskikan untuk menakar elastisitas antara penerimaan pajak dengan produk domestik bruto (PDB).

Secara historis, rata-rata level *tax buoyancy* di Tanah Air berada pada kisaran 0,8. Artinya, setiap 1% pertumbuhan ekonomi nasional, penerimaan pajak hanya naik sebesar 0,8%. Dengan demikian, dalam kondisi ekonomi normal setoran pajak tidak elastis.

Kabar sedap sempat mencuat ketika pemerintah berhasil mencatatkan *tax buoyancy* jauh lebih tinggi dari angka historis, yakni sebesar 2,04 pada 2021 dan 2,08 pada tahun lalu.

Akan tetapi, tingginya elastisitas penerimaan pajak pada periode krisis adalah sesuatu yang normal. Tak hanya di Indonesia, kondisi serupa juga dialami oleh banyak negara.

Musababnya, ketika krisis, ekonomi dipastikan melemah sehingga mengakibatkan terjadinya kontraksi penerimaan pajak. Di sisi lain, pemerintah pun memberikan banyak relaksasi atau insentif pajak sebagai respons dari dinamika krisis itu.

Tak pelak, penurunan penerimaan pajak selama pandemi Covid-19 jauh lebih parah dibandingkan dengan pengurusan produk domestik bruto (PDB).

Adapun, tahun ini diasumsikan ekonomi sepenuhnya membaik dan insentif pun jauh lebih irit apabila dibandingkan dengan kondisi pada 3 tahun terakhir. Hal ini pun dicermati betul oleh pe-

mangu kebijakan yang sangat pesimis-tis mampu mengulang keberhasilan 2 tahun terakhir dalam kaitan *tax buoyancy*.

*Bisnis* mencatat, otoritas fiskal menghitung proyeksi *tax buoyancy* pada tahun ini pun hanya berkutat di bawah 1 alias kembali ke fase normal. Elastisitas yang kian terbatas inilah menjadi biang kerok pada sulitnya mengerek rasio pajak alias *tax ratio* yang pada tahun ini ditargetkan sebesar 9,61%. Pasalnya, pertumbuhan penerimaan pajak jauh lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi.

Direktur Eksekutif Pratama Kreston Tax Research Institute Prianto Budi Saptono mengatakan idealnya ketika ekonomi berada di kondisi krisis, tekanan, atau dalam masa pemulihan seperti 2020—2022, *tax buoyancy* tidak terlalu tinggi.

"*Tax buoyancy* yang tinggi pada saat ekonomi normal menunjukkan hal bagus. Akan tetapi, jika *tax buoyancy* tinggi saat krisis, kondisi demikian tidak selalu mencerminkan fiskal yang bagus," jelasnya kepada *Bisnis*, Rabu (5/7).

Sesungguhnya, *tax buoyancy* sangatlah penting dalam rangka mewujudkan penerimaan perpajakan yang berkelanjutan seiring dengan tumbuhnya ekonomi.

Kondisi tersebut memiliki kaitan erat dengan relatif tingginya *shadow economy* dan belum maksimalnya tingkat kepatuhan wajib pajak.

Sementara itu, faktor yang juga menjadi akar persoalan dari terbatasnya elastisitas penerimaan pajak adalah adanya *mismatch* antara sektor yang mencatatkan pertumbuhan PDB tinggi dengan sektor yang penerimaan pajaknya tinggi.

Artinya, pertumbuhan PDB dari sektor-sektor yang kontribusi penerimaan pajaknya tinggi mencatatkan penurunan kinerja dalam kontribusinya ke PDB.

Misalnya, sektor pertanian yang memiliki kontribusi relatif besar bagi PDB, penerimaan pajaknya relatif kecil karena upah tenaga kerja sektor yang berada di bawah bawah penghasilan tidak kena pajak (PTKP) dan cenderung lekat dengan *shadow economy*. Pemerintah pun berulang kali me-

nyampaikan bahwa seyogyanya pertumbuhan ekonomi dengan penerimaan perpajakan memiliki hubungan kuat, yang ditunjukkan melalui indikator *tax buoyancy*.

Artinya, nominal pertumbuhan ekonomi harus identik dengan pertumbuhan penerimaan pajak. Apalagi, *tax buoyancy* merefleksikan adanya potensi untuk mengoptimalkan penerimaan perpajakan dari kegiatan ekonomi.

### DIVERGENSI PEMULIHAN

Direktur Center of Economic and Law Studies Bhima Yudhistira, mengatakan pada tahun ini pemulihan penerimaan pajak tidak terjadi secara merata di seluruh sektor.

Mayoritas lini usaha pun justru mencatatkan penurunan pertumbuhan penerimaan yang dipicu oleh normalisasi harga komoditas sumber daya alam (SDA).

"Solusinya dari sisi pendapatan harus menggali sumber penerimaan baru termasuk pajak karbon hingga perluasan cukai," ujarnya.

Kementerian Keuangan dalam laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023, pada tahun ini terjadi moderasi penerimaan pajak karena beberapa faktor.

Pertama, tidak adanya kebijakan berulang seperti Program Pengungkapan

Sukarela (PPS).

Kedua, tingginya fluktuasi di sektor konsumsi yang memengaruhi setoran PPN.

Ketiga, belanja pemerintah yang sejuah ini masih cekak.

Keempat, terbatasnya aktivitas impor yang memiliki efek besar pada aktivitas industri atau manufaktur sehingga berimbas pada terbatasnya PPN Impor dan PPh Badan.

### Kelima, harga komoditas.

Aneka faktor pembedat itu bakal makin menyulitkan pemerintah untuk mengejar target rasio pajak.

Celakanya, otoritas pajak pun masih amat mengandalkan sektor itu-itu saja yang seajanya masih rentan, baik pajak penghasilan (PPh) maupun pajak pertambahan nilai (PPN).

"Yang jadi penopang, yaitu PPh pasal 21, PPh badan, serta PPN dalam negeri dan PPN impor," kata Dirjen Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo, belum lama ini.

Pemangku kebijakan boleh berbangga lantaran berhasil membawa ekonomi mengarungi lautan pandemi yang penuh dengan gelombang.


Namun, tugas di sektor pajak masih belum tuntas. Selanjutnya, pekerjaan terberat adalah melinierkan pertumbuhan ekonomi dengan penerimaan pajak untuk mengokohkan fiskal negara. ■



... jika *tax buoyancy* tinggi saat krisis, kondisi demikian tidak selalu mencerminkan fiskal yang bagus.

Dokumentasi

BIRO HUMAS DAN INFORMASI PUBLIK KEMANTAN

Title	Menghadapi Perlambatan Ekonomi	 Kementerian Pertanian
Date	6 Juli 2023	
Media	Bisnis Indonesia	
Page	2	
Author	Desmon Silitonga	

# Menghadapi Perlambatan Ekonomi

**P**erekonomian dunia pasca-pandemi seperti ini harus menapaki jalan terjal nan berbatu. Proyeksi dari berbagai lembaga ekonomi dan keuangan dunia, seperti Bank Dunia, Dana Moneter Internasional (IMF), dan Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) sepakat memangkas pertumbuhan ekonomi global 2023. Bahkan, dalam jangka menengah, potensi perlambatan pertumbuhan ekonomi global masih tetap terbuka.

Sejumlah faktor yang memengaruhi perlambatan pertumbuhan ekonomi global itu, seperti inflasi inti yang masih relatif tinggi, suku bunga yang tinggi, beban utang yang tinggi, perdagangan dan investasi global yang melambat imbas fragmentasi geopolitik yang meningkat, dan populasi yang cenderung menua.

Kinerja pertumbuhan ekonomi di negara-negara maju cenderung melambat, bahkan berkontraksi akibat inflasi tinggi dan suku bunga tinggi yang masih mendera. Daya beli dan investasi cenderung terpancang. Sektor keuangan masih diliputi oleh ketidakpastian dan kerapuhan. Kebijakan fiskal ekspansif sulit diimplementasikan untuk menjadi bantalan (*buffer*) untuk menyerap *shock*, akibat defisit anggaran dan utang yang sudah terlanjur tinggi.

Di saat yang sama, China sebagai kekuatan ekonomi terbesar kedua di dunia yang juga kerap jadi penyelamat, di kala perekonomian global mengalami kelesuan, ternyata juga mengidap perlambatan. Tingkat konsumsi dan investasi tetap lemah meski aktivitas ekonomi sudah direlaksasi pascapenguncian wilayah (*lockdown*) pada 2022 lalu.

Menurut Michael Pettis, Guru Besar ilmu Keuangan dari Sekolah Management Guanghua, Universitas Peking, jika tidak ada terobosan kebijakan pemerintah China untuk menyeimbangkan lagi kinerja konsumsi dan investasi, maka pertumbuhan ekonomi China di masa mendatang berpotensi turun ke di level sekitar 2%—3% per tahun dari saat ini di level 4%—5%.

Melambatnya kinerja pertumbuhan ekonomi di negara-negara perekonomian besar dan diikuti dengan melambatnya harga komoditas global memberikan dampak langsung terhadap perekonomian Indonesia, khususnya melalui jalur perdagangan.

Sepanjang Januari—Mei 2023, nilai akumulasi surplus neraca perdagangan turun sebesar 15,9% (YoY) dari periode yang sama tahun 2022 menjadi US\$16,6 miliar. Dampaknya, beberapa sektor berorientasi ekspor, seperti tekstil harus melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akibat lesunya pendapatan di tengah biaya yang meningkat.

Bukan itu saja, penurunan kinerja perdagangan ini juga memberikan dampak pada penerimaan pajak yang menjadi kontributor terbesar dalam penerimaan APBN. Sepanjang Januari—Mei 2023, penerimaan pajak tumbuh sebesar 17,7% (YoY) menjadi Rp 830,29 triliun. Hasil ini lebih rendah dibandingkan dari periode yang sama tahun 2022 yang tumbuh sebesar 53,5% (YoY).

## MENSTIMULASI DAYA BELI

Di tengah kinerja pertumbuhan ekonomi global yang melambat itu, maka tumpuan pertumbuhan pada konsumsi RT. Sejauh ini, kinerja konsumsi masih relatif kuat. Hal ini tecermin dari sejumlah indikator, seperti Indeks Kepercayaan Konsumen



**DESMON SILITONGA**  
Riset Analis PT Capital Asset Management

(IKK) di atas 100 (optimis) dan Indeks Penjualan Ritel (IPR) yang tumbuh positif.

Untuk itulah, daya beli masyarakat harus terus distimulasi agar kinerja konsumsi sebagai tumpuan pertumbuhan ekonomi bisa lebih maksimal dan tidak merosot. Harapannya, momentum pemulihan ekonomi yang sudah terlihat sejak 2022 berlanjut.

Stimulasi daya beli ini bisa dilakukan melalui kebijakan relaksasi moneter. Meski begitu, mengingat masih tingginya inflasi di negara-negara maju, membuat bank sentral, khususnya The Fed masih akan melanjutkan kenaikan suku bunga, setidaknya dua kali lagi hingga akhir tahun ini.

Situasi ini, membuat Bank Indonesia (BI) akan memilih mempertahankan suku bunga kebijakan (BI-7DRR) di level 5,75% dan tidak terburu-buru untuk memangkas suku bunga. Kebijakan untuk mempertahankan suku bunga sebagai upaya untuk menjaga stabilitas nilai tukar dan menjangkar inflasi agar berada dalam lintasan yang diharapkan.

Oleh sebab itu, kebijakan fiskal lebih efektif dalam menstimulasi daya beli.

Apalagi, sampai dengan Mei 2023, APBN masih mencatatkan surplus sebesar Rp204.3 triliun (0,97% dari PDB). Ekspansi fiskal masih terbuka lebar untuk dilakukan, tanpa mengabaikan konsolidasi fiskal, yaitu mengembalikan defisit APBN maksimal 3% dari PDB sesuai dengan mandat UU No. 2/2020.

Belanja fiskal bisa diarahkan dan diperbesar untuk menstimulasi sektor-sektor yang dapat menciptakan kesempatan kerja besar, seperti infrastruktur dan UMKM. Selain itu, alokasi perlindungan sosial diperbesar dan distribusinya dipercepat agar bisa menyanggah daya beli masyarakat berpenghasilan rendah.

Tentu saja, kebijakan pengendalian inflasi harus terus diperkuat. Meski dalam lima bulan terakhir, tren inflasi terus menurun imbas penurunan harga komoditas global dan kebijakan moneter ketat dari Bank Indonesia, tetapi harga sejumlah komoditas bahan pangan, seperti beras, daging ayam, telur, dan gula masih cenderung naik. Harga bahan pangan harus terus didorong turun dan distabilkan.

Bagaimanapun, sebagian besar pendapatan masyarakat dialokasikan untuk pengeluaran makanan dan transportasi. Sehingga, jika harga bahan pangan cenderung naik, maka akan mengurangi alokasi pengeluaran untuk nonmakanan, seperti belanja *durables goods* dan aktivitas *leisure* lainnya.

Setiap artikel yang dikirim ke redaksi hendaknya diketik dengan spasi ganda maksimal 5.000 karakter, disertai riwayat hidup (*curriculum vitae*) singkat tentang diri penulis juga **dilengkapi foto terbaru**. Artikel yang masuk merupakan hak redaksi Bisnis Indonesia dan dapat diterbitkan di media lain yang tergabung dalam Jaringan Informasi Bisnis Indonesia (JIBI). Apabila lebih dari 1 minggu artikel yang diterima belum diterbitkan tanpa pemberitahuan lain dari redaksi, penulis berhak mengirimkannya ke media lain. Setiap tulisan yang dimuat merupakan pendapat pribadi penulis. Artikel dapat dikirim melalui alamat e-mail [redaksi@bisnis.com](mailto:redaksi@bisnis.com).

Dokumentasi

**BIRO HUMAS DAN INFORMASI PUBLIK  
KEMANTAN**

Title	Menjadi Sahabat dari Hati ke Hati
Date	6 Juli 2023
Media	Bisnis Indonesia
Page	12
Author	Kanasugi Kenji



Kementerian Pertanian

| DUTA BESAR JEPANG UNTUK INDONESIA KANASUGI KENJI |

## Menjadi Sahabat dari Hati ke Hati

*Bisnis, JAKARTA — Hubungan diplomatik Indonesia-Jepang telah terjalin erat sejak 1958. Kini, di usia 65 tahun hubungan diplomatik kedua negara memasuki fase untuk turut membantu menyelesaikan berbagai tantangan dunia.*

*Di tengah perlambatan ekonomi global dan pemulihan yang terus berlanjut, keduanya kian mempererat kerja sama perdagangan dan investasi.*

*Guna mengetahui lebih lanjut mengenai penguatan kerja sama kedua negara, Bisnis berkesempatan mewawancarai Duta Besar Jepang untuk Indonesia Kanasugi Kenji, belum lama ini. Berikut petikannya.*

### Bagaimana sejarah hubungan diplomasi antara Indonesia dan Jepang, dan bagaimana perkembangannya dari waktu ke waktu?

Saat ini, Jepang dan Indonesia merupakan mitra strategis yang berbagi nilai fundamental seperti demokrasi, hak asasi manusia, dan supremasi hukum. Terjalinya hubungan diplomatik antara Jepang dan Indonesia pada 1958, Jepang telah menjadi sahabat dari hati ke hati bagi Indonesia.

Kemitraan kita kini melampaui kerja sama bilateral, memasuki fase untuk bersama-sama mengatasi tantangan bersama global.

### Apa bidang utama kerja sama ekonomi antara Indonesia dan Jepang, dan seberapa pentingkah Jepang sebagai mitra dagang bagi Indonesia?

Jepang telah menjadi salah satu mitra perdagangan dan investasi utama serta donor terbesar ODA (Bantuan Pembangunan Resmi) untuk Indonesia. Untuk lebih memfasilitasi kerja sama ekonomi kita, Perjanjian Kemitraan Ekonomi Jepang-Indonesia (JIEPA) mulai berlaku pada 2008. Pada saat yang sama, berbagai proyek kerja sama sedang berlangsung terutama di bidang pembangunan infrastruktur, transisi energi, perubahan iklim, serta pertanian dan perikanan.

Jepang telah menjadi mitra dagang yang stabil bagi Indonesia sebagai tujuan ekspor energi dan sumber daya alam, serta sumber impor untuk memenuhi permintaan yang kuat di sektor-sektor seperti otomotif dan permesinan.

Benar bahwa jumlah perdagangan bilateral antara kedua negara

kita menurun, namun karena perusahaan Jepang memperluas basis produksinya di Indonesia. Saya sangat percaya bahwa Jepang akan tetap menjadi mitra dagang penting bagi Indonesia selama bertahun-tahun mendatang. Selain itu, revisi JIEPA sedang dilakukan untuk lebih mempromosikan perdagangan dan investasi bilateral dengan memaksimalkan keunggulan komparatif kedua negara.

### Bagaimana hubungan politik dan keamanan antara Indonesia dan Jepang berkembang, dan apa isu utama yang menjadi perhatian bersama?

Kedua negara kita juga menjaga hubungan erat di bidang politik dan keamanan. Pada 2006, hubungan bilateral kita ditingkatkan sebagai kemitraan strategis. Pada 2015 dan 2021, kedua negara mengadakan Pertemuan Menteri Luar Negeri dan Pertahanan.

Pada Agustus tahun lalu, Japan Ground Self-Defense Force (JGSDF) pertama kali mengikuti latihan multilateral "Super Garuda Shield" di Indonesia. Indonesia sebagai bagian dari kerja sama PKO (Peace Keeping Operation). Kedua negara juga telah memperkuat kerja sama di bidang keamanan maritim. Untuk itu, Jepang saat ini sedang melakukan survei untuk memberikan kapal patroli kepada Badan Penjaga Pantai Indonesia.

### Apa peran Jepang dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia, dan apa saja proyek besar yang pernah diikuti Jepang?

Jepang telah memperluas kerja sama untuk mengembangkan "infrastruktur berkualitas" yang sejalan



Kanasugi Kenji

dengan strategi ekonomi dan pembangunan Indonesia. Jepang juga memprioritaskan pengembangan sumber daya manusia (SDM) negara ini agar masyarakat Indonesia dapat mengelola dan mengoperasikan sendiri infrastruktur yang baru dibangun. Jepang telah mencoba untuk berkontribusi pada "pertumbuhan berkualitas" Indonesia.

Izinkan saya merujuk beberapa contoh utama. *Pertama*, MRT Jalur Utara-Selatan yang merupakan simbol kerja sama infrastruktur antara Jepang dan Indonesia telah banyak digunakan oleh banyak warga Jakarta sejak dibuka pada Maret 2019. Perpanjangan jalur ke utara saat ini sedang dibangun. Dan Jepang terus melanjutkan, untuk memberikan tidak hanya dukungan keuangan tetapi juga kerja sama teknis dan pengembangan SDM.

*Kedua*, terminal mobil Pelabuhan Patimban di Jawa Barat, yang dibangun dan dikelola oleh perusahaan Jepang, mulai beroperasi pada Desember 2021, dan semakin banyak kendaraan buatan Indonesia yang diekspor melalui pelabuhan ini ke Asean dan negara lain. Untuk memperluas kapasitas terminal mobil saat ini sedang dilakukan dengan kerja sama Jepang.

*Ketiga*, Jepang selama bertahun-tahun telah mendukung pembangunan PLTU yang kini menjadi

sumber listrik *baseload* di Indonesia, khususnya PLTU Jawa Tengah yang mulai beroperasi tahun lalu merupakan PPP (*Private Public Partnership*) unggulan di sektor energi. Menanggapi tren baru-baru ini menuju dekarbonisasi, Jepang juga berfokus pada sumber energi terbarukan seperti panas bumi dan tenaga air. PLTP Sarulla di Sumatra Utara adalah salah satu pembangkit panas bumi terbesar di dunia dengan kapasitas 330 MW.

*Keempat*, Jepang telah memperluas kerja sama pengurangan risiko ke Indonesia, Pantai Kuta, Pantai Nusa Dua, dan pantai-pantai terkenal lainnya di Bali telah dilindungi dari erosi oleh perusahaan konstruksi Jepang dengan bantuan ODA sejak 1996. Banyak turis sekarang menikmati pantai-pantai ini, menciptakan dampak positif bagi pariwisata.

### Apa saja tantangan dan peluang dalam hubungan Indonesia-Jepang, dan bagaimana cara mengatasinya ke depan?

Saya pikir komunitas internasional mencapai titik balik bersejarah pada 2022, dan akan terus menghadapi situasi kritis tahun ini.

Dalam pernyataan pers tahunannya pada Januari, Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi menjelaskan bahwa di saat tantangan global yang kompleks, pandangan positif, kerja sama, dan optimisme bahkan lebih diperlukan, dan Jepang persis berada di halaman yang sama.

Tahun ini akan memberikan momentum yang lebih penting bagi Jepang dan Indonesia, karena menandai peringatan 65 tahun hubungan diplomatik kita dan peringatan 50 tahun Persahabatan dan Kerjasama Asean-Jepang.

Jepang dengan kepresidenan G7 akan terus bekerja sama dengan Indonesia, Ketua Asean tahun ini, dalam mengatasi tantangan global dan regional. Sebagai bagian dari upaya bersama, Presiden Joko Widodo menghadiri pertemuan KTT G7 di Hiroshima pada bulan Mei atas undangan dari Perdana

Menteri Kishida dan mengadakan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Kishida tentang berbagai tantangan.

### Apa implikasi dari pergeseran prioritas strategis Jepang, seperti kebijakan "Indo-Pasifik yang Bebas dan Terbuka", terhadap hubungannya dengan Indonesia?

Pada bulan Maret tahun ini, Perdana Menteri Kishida mengumumkan rencana baru untuk "Indo-Pasifik yang Bebas dan Terbuka (FOIP)". Menurut Perdana Menteri Kishida, bahkan pada titik balik ini, konsep dasar FOIP tetap sama. Kami akan meningkatkan konektivitas kawasan Indo-Pasifik, mendorong kawasan ini menjadi tempat yang menghargai kebebasan, supremasi hukum, bebas dari paksaan atau paksaan, dan membuatnya makmur.

Dengan latar belakang ini, kita harus menegaskan kembali dan berbagi pemahaman bahwa akar dari konsep FOIP adalah mempertahankan "kebebasan" dan "aturan hukum". Selain itu, kami baru menetapkan "empat pilar kerja sama untuk FOIP" yang sesuai dengan titik balik sejarah yang kita hadapi.

*Pertama*, kita terus mempromosikan prinsip perdamaian dan aturan untuk kemakmuran. *Kedua*, kita bersama mengatasi tantangan "global commons" dengan cara Indo-Pasifik. *Ketiga*, kami akan meningkatkan elemen inti dari kerja sama FOIP. *Keempat*, kami akan memperluas upaya keamanan dan penggunaan laut yang aman ke udara, karena FOIP secara konsisten berfokus pada "laut".

Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan di sini, berdasarkan pidato Perdana Menteri Kishida, semuanya relevan untuk Indonesia karena Jepang dan Indonesia berada di kapal yang sama. Kedua negara kita adalah dua negara demokrasi maritim terbesar di dunia yang terletak di pertemuan Indo-Pasifik.


Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan di sini, berdasarkan pidato Perdana Menteri Kishida, semuanya relevan untuk Indonesia karena Jepang dan Indonesia berada di kapal yang sama. Kedua negara kita adalah dua negara demokrasi maritim terbesar di dunia yang terletak di pertemuan Indo-Pasifik.

Pewawancara: Lukas Hendra T.M



Dokumentasi

BIRO HUMAS DAN INFORMASI PUBLIK  
KEMANTAN

Title	Pengawasan Dana Desa	 Kementerian Pertanian
Date	6 Juli 2023	
Media	Bisnis Indonesia	
Page	2	
Author	Amin Pranata	

## Pengawasan Dana Desa

Panitia Kerja Badan Legislasi DPR RI telah membahas poin revisi UU No. 6/2014 tentang Desa atau UU Desa. Dalam perkembangannya, sebagian fraksi meminta agar Dana Desa dibagikan masing-masing Rp2 mili-

ar. Namun, belakangan, Baleg memutuskan untuk memberikan dana desa senilai 20% dari dana transfer daerah.

Terlepas dari nilai dana desa yang dibagikan, Pemerintah melalui Menteri Keuangan Republik Indonesia menekankan agar penggunaan Dana Desa Tahun

2023 agar fokus pada beberapa kegiatan yang menjadi penekanan pemerintah di antaranya penanganan kemiskinan ekstrem serta penguatan ketahanan pangan, di samping tetap ada pencegahan dan penanganan bayi *stunting*.

Lalu siapa yang mengawasi dana desa? Dana Desa ada yang

digunakan untuk keperluan pribadi, ada yang sampai empat kali kawin. Walaupun tidak semua berperilaku buruk, dalam menggunakan Dana Desa, tetapi tetap harus ada pengawasan.

Amin Pranata  
Jakarta

Title	TAKTIK CERDIK JAWA BARAT
Date	6 Juli 2023
Media	Bisnis Indonesia
Page	6
Author	redaksi@bisnis.com



| PESANTREN BERDIKARI |

# TAKTIK CERDIK JAWA BARAT

Program One Pesantren One Product yang digagas oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat diyakini mampu memperkokoh pesantren di wilayah ini untuk menciptakan kemandirian ekonomi.

redaksi@bisnis.com



Mimpi mendirikan 1.000 warung itu mulai nyata di mata Pimpinan Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Ihsadiyah Romeo Fauzi Umar Rangkuti. Usai mengikuti program One Pesantren One Product (OPOP), lahir optimisme bahwa pesantren bisa kembali menjadi solusi ekonomi keumatan di masa depan.

Awalnya, Warung Amal Umat (Waramat) yang didirikan Al Ihsadiyah di Kelurahan Tuguja, Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya pada 2016 hanya toko kelontong biasa. Waramat hanya memenuhi kebutuhan warga seadanya hingga 2019.

"Pada 2020, alhamdulillah kami perbesar Waramat, omzetnya mencapai Rp75 juta per bulan," katanya kepada *Tin Jelajah OPOP Bisnis Indonesia*, pekan lalu.

Waramat berlokasi di bangunan seluas 7x17 meter. Di lokasi ini, Romeo yang dibantu oleh para santri yang tengah membuat *pilaf project* warung modern yang rencananya bakal direplikasi ke pesantren lain di Tasikmalaya.

Menurutnya, jika *piloting* ini sudah dinilai baik, maka visi untuk mewujudkan 1.000 warung di Tasikmalaya yang dipimpin oleh almarhum ayahnya Kyai Haji Zenzen MZA akan terus dikejar.

Untuk itu, pria berusia 33 tahun itu kini tengah menyusun konsep dengan ilmu dan suntekan dana dari program OPOP. "Alhamdulillah saya di OPOP itu sampai tingkat 3 [level provinsi]," ujarnya.

Kisah serupa juga datang dari Ponpes Nurul Hidayat di Kecamatan Karangengah, Kabupaten Garut yang sukses meningkatkan kapasitas temak domba pascabergabung dalam program OPOP.

Direktur Manajemen Domba Cecep Ernanto mengatakan bahwa saat ini populasi domba di kandang pesantren mencapai lebih dari 400 ekor, meski saat ini hanya menyisakan 100 ekor lantaran ludes terjual pada momen Iduladha kemarin.

"Pada 2017 hanya 20 ekor, lalu 2019 mulai bergabung ke OPOP. Alhamdulillah kami dapat tambahan dana dari penghargaan yang kami terima sekitar Rp600 jutaan," katanya.

Menurutnya, selama ini proses dan manajemen produksi pihaknya berjalan secara



Menurutnya, pihaknya memang merasakan perubahan pascabergabung dalam program OPOP. Salah satu yang paling dia rasakan adalah bagaimana Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) melalui programnya tersebut mendorong pesantren kembali kepada fitrahnya, yakni sebagai pusat kegiatan masyarakat.

"Dulu kan pesantren ini jadi pusat kegiatan, mulai dari kegiatan sosial, kegiatan pendidikan, hingga salah satunya kegiatan ekonomi," jelasnya.

Dia mengungkapkan bahwa sebelum bergabung bersama OPOP, pihaknya sudah mencoba membudidayakan domba Garut.

Hanya saja, kala itu sistem peternakan masih menggunakan cara tradisional, sehingga sulit berkembang. "Memang setelah masuk OPOP ini kami mengubah kebiasaan temak, dari tradisional ke modern, sehingga hasilnya sudah teras."

Di lokasi ini, suana jangkrik kini menjadi bagian penting dari aktivitas keseharian mereka. Uniknya, berisik jangkrik justru menjadi sumber usaha pesantren tersebut dalam 2 tahun terakhir.

Pengasuh Lembaga Tahfidz Quran Al Aqsha, Ibnu Hasin, menjelaskan bahwa pesantrennya memilih mengembangkan jangkrik sebagai upaya pihaknya menjaga pesantren swadaya tersebut tetap bertani.

Dia memandang momen pandemi Covid-19 mendorong lembaga ini untuk mencari sumber penghasilan lain. Ibnu menjelaskan, pihaknya sengaja memilih jangkrik agar nilai lembaga pendidikan agama yang didirikan secara swadaya tersebut tetap terjaga.

Menurutnya, budi daya jangkrik dipilih lantaran siklus hidup lebih cepat, modal relatif kecil, menghemat lahan dan pakan, serta harga jual yang menjanjikan.

Bahkan, imbuhnya, dari setiap satu kilogram telur yang diabur, bisa menghasilkan panen jangkrik hingga 90 kilogram (kg).

"Harga telur itu Rp300.000 per kg. Sementara itu, satu kg jangkrik itu Rp20.000 per kg-nya. Artinya, banyak pundi-pundi uang yang bisa dihasilkan."

Hal ini kemudian yang memotivasi optimisme lembaga Tahfidz Quran Al Aqsha guna unjuk gigi dalam program OPOP.

Dalam lomba tersebut, lembaga tersebut berhasil menyabet juara level *startup* dalam OPOP 2022 dengan total hadiah sebesar Rp75 juta. "Alhamdulillah berhasil juara dan kami bisa

memperbesar unit usaha kami," katanya.

Namun demikian, program OPOP menuntut pertanya santri untuk memiliki keterampilan dalam menjalankan usaha dan berbisnis.

"Santri di sini tidak hanya diajarkan *ngaji*, tapi juga *ngaji* [mencari makan]," kata Pemilik Pesantren As-Sakinah Aseng Nur Qomarudin, di Dusun Ciwaler, Desa Burujul Kulon, Kecamatan Jatiwangi, Kabupaten Majalengka.

Aseng mengaku selalu melibatkan santrinya untuk mulai bisa melihat dan mengelola bisnis produksi genteng yang menjadi produk unggulan pesantrennya.

Dia menjelaskan bahwa usaha produksi genteng dengan merek *lenang Jaya* ini sebenarnya mulai dijalankan oleh orang tuanya, hingga akhirnya bisa melahirkan pesantren As-Sakinah.

"Jadi bukan bikin pesantren dulu baru usaha genteng, tapi hasil dari jualan produksi genteng ini akhirnya jadi pesantren," imbuh Aseng yang merupakan lulusan Ponpes Gontor ini.

Dia mengaku bahwa dalam 1 bulan, ia bisa menjual rata-rata hingga 100.000 lembar genteng untuk konsumen yang berasal dari Jawa Barat dan sebagian Jawa Tengah.

"Sekarang lagi banyak pesantren, cuma karena mesin pencetaknya kurang, jadi kita optimalisasi saja yang ada," jelasnya.

Oleh karena itu, dia berharap dengan pesantrennya masuk dalam program OPOP Pemprov Jabar, maka bisa meningkatkan skala bisnis yang saat ini tengah ia banggakan.

"Alhamdulillah kita saat ini banyak juga konsumen baru dari teman-teman pesantren lain yang akan membangun, itu belanjanya ke kami," jelasnya.

Pemprov Jabar memang menitikberatkan program OPOP kepada pesantren setidaknya dilandasi oleh sejumlah fakta menyusul wilayah ini yang merupakan daerah dengan jumlah pesantren terbanyak di Indonesia.

Dari 25.938 pesantren di Indonesia, Jawa Barat memiliki jumlah pesantren terbanyak dengan persentase sebesar 31,8%.

Hal ini merujuk pada *Operasi* *Daftar* *Labar* yang menunjukkan bahwa jumlah pesantren di Jawa Barat mencapai 8.728 pesantren pada 2021. Hanya saja, dari jumlah tersebut baru 8.264 pesantren yang mempunyai Nomor Standar Pondok Pesantren.

Tak hanya itu, fakta lainnya adalah masih banyak pesantren yang belum terdaftar di Kementrian Agama.

Oleh karena itu, Pemprov Jabar menaruh perhatian khusus pada pengembangan dan potensi usaha kecil menengah (UKM) yang dibangun pesantren lewat program OPOP. Sasaran dari kegiatan ini adalah pesantren atau koperasi pesantren yang memiliki potensi bisnis atau bisnis yang sudah berjalan.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan bahwa lewat program tersebut pihaknya genar melakukan peningkatan kualitas kelembagaan, peningkatan pembiayaan usaha, peningkatan akses pasar (*offtaker & promosi*), serta dukungan wirausaha demi mendukung tercapainya target UKM naik kelas (*scaleup*).

Menurutnya, bisnis UKM dinilai menjadi salah satu solusi yang cukup efektif untuk mengurangi angka pengangguran.

Selain itu, bisnis UKM juga dinilai sebagai pilihan yang tepat bagi anak muda saat dihadapkan dengan pelemahan ekonomi global. "Dengan strategi digital dan kreativitas sebagai identitas kita, Jawa Barat akan jadi provinsi paling progresif dalam *small business strategy*," jelasnya.


Sementara itu, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil (KUK) Jawa Barat mencatat bahwa dari sisi kinerja program serta jumlah penerima manfaat OPOP, program ini sudah memenuhi target yang ditetapkan di awal, yaitu realisasi sebanyak 5.018 pesantren dari target 5.000 pesantren hingga 2023. Bahkan, dari hasil *monitoring* dan evaluasi pada 2022, program tersebut menunjukkan adanya kenaikan target para peserta dengan tingkat variasi yang berbeda.

Peserta OPOP 2022 mayoritas memilih usaha makanan untuk mengangkat kemandirian ekonomi pesantren sebanyak 63 persen. Kemudian, peternakan dengan 38 pesantren, pertanian 31 pesantren, esayen, perdagangan umum dan kerajinan masing-masing 24 pesantren, disusul minuman 18 pesantren, dan 14 pesantren mengumpu usaha jasa.

Kepala Dinas KUK Jawa Barat Kusmana Hartadi menjelaskan bahwa dari hasil monitoring dan evaluasi, sebanyak 64% peserta omzetnya berada di bawah Rp50 juta. Disusul 31% pesantren luasan mencapai Rp50 omzetnya mencapai Rp50 juta sampai dengan Rp350 juta.

"Sisanya, sebanyak 6% menunjukkan omzet yang luar biasa, mencapai Rp300 juta hingga Rp2,5 miliar. Alhamdulillah," *034/049/057* **B**



Title	Sampah Bakal Disulap Jadi Pupuk	 Kementerian Pertanian
Date	6 Juli 2023	
Media	Rakyat Merdeka	
Page	11	
Author	OSP	

DKI Bangun Tempat Pengolahan Baru Di Jakpus

# Sampah Bakal Disulap Jadi Pupuk

SUKU Dinas Lingkungan Hidup (LH) Jakarta Pusat (Jakpus) akan membangun Tempat Pengolahan Sampah *Reuse, Reduce* dan *Recycle* (TPS3R). TPS3R akan dibangun di atas lahan seluas 1.000 meter persegi di Jalan Rawasari, Cempaka Putih. Pembangunannya ditargetkan dimulai bulan depan.

Pelaksana Harian (Plh) Kepala Suku Dinas LH Jakpus Sulastris mengatakan, TPS3R merupakan sistem pengolahan sampah dengan inovasi teknologi mesin pencacah sampah dan pengayak kompos. Sistem pengolahan samlah ini diklaim lebih efektif dan efisien.

“Saat ini rencana pembangunan TPS3R tengah memasuki proses kajian fisik di Pokja Unit Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa (UPPB) Jakarta Pusat,” ungkap Sulastris di Jakarta, Selasa (4/7).

Dalam proyek ini akan ada bangunan baru yang dilengkapi berbagai peralatan untuk menggeola sampah. “Akan ada alat-alat khusus penghancur sampah plastik, alat pencacah sampah dan alat pengering sampah organik,” sambungnya.

Sulastris menjelaskan, sampah organik dan anorganik akan dipilah dan diolah secara terpisah. Untuk sampah organik akan diolah menjadi bahan baku pupuk kompos.

Pembangunan dan pengadaan peralatan pendukung TPS3R menelan anggaran Rp 9,7 miliar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Rinciannya, Rp 4,2 miliar untuk bangunan fisik dan Rp 5,5 miliar untuk pengadaan peralatan.

“Pembangunan ditargetkan dimulai pada Agustus mendatang. TPS3R ini akan memberikan solusi dalam mengatasi

persoalan sampah dan dampak yang ditimbulkan,” tandasnya.

#### Warga Peduli Sampah

Hasil survei Populix menyebut sebanyak 75 persen masyarakat Indonesia aktif berpartisipasi dalam program pengelolaan sampah. “Hal ini menunjukkan masyarakat sudah memiliki kesadaran dan keinginan yang tinggi untuk mengelola sampah,” ujar Co-Founder Populix, Timothy Astandu.

Berdasarkan data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), total sampah nasional pada 2021 mencapai 68,5 juta ton. Dari jumlah itu, sebanyak 17 persen atau sekitar 11,6 juta ton dari jumlah tersebut disumbang oleh sampah plastik. Pada 2022, jumlah sampah nasional naik menjadi 70 juta ton.

Dari 69 persen sampah yang masuk ke Tempat Pembuangan

Akhir (TPA), hanya 7 persen yang didaur ulang. Jika dibandingkan dengan Malaysia dan Singapura, Indonesia tertinggal jauh dalam pengolahan sampah.

“Berbagai inisiatif terus dilakukan agar makin banyak masyarakat yang paham bagaimana cara mengelola sampah,” ujar Timothy.

#### Kurangi Sampah Plastik

Dinas LH DKI Jakarta meminta masyarakat mengurangi penggunaan plastik sebab sampah plastik sulit didaur ulang.


Caranya, gunakan kantong belanja ramah lingkungan saat berbelanja di pusat perbelanjaan, toko, swalayan dan pasar tradisional.

Kepala Dinas LH DKI Jakarta Asep Kuswanto mengatakan, pengurangan sampah plastik di pasar tradisional merupakan tantangan yang harus diatasi. Hal

itu mengingat kebutuhan penjual dan pembeli di pasar tradisional terhadap plastik masih tinggi.

“Pengawasan yang dilakukan oleh pengelola pusat perbelanjaan di pasar modern lebih ketat dibandingkan dengan pasar tradisional,” ungkapnya.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) No. 77 tahun 2020 tentang Bidang Pengelolaan Sampah Lingkup RW. Pergub tersebut merupakan salah satu upaya untuk mengencangkan pengelolaan sampah dari hulu ke hilir, salah satunya meminimalisir timbunan sampah plastik dari sumbernya. Diharapkannya, warga membuang sampah plastik melalui Bank Sampah sehingga bisa meminimalisir dampak buruk sampah plastik bagi lingkungan. ■ OSP

Title	DSNG Antisipasi Efek El Nino	 Kementerian Pertanian
Date	6 Juli 2023	
Media	Bisnis Indonesia	
Page	10	
Author	Lim F. Timorria	

| STRATEGI EMITEN |

# DSNG Antisipasi Efek El Nino

Bisnis, JAKARTA — Di tengah antisipasi dampak ancaman El Nino, PT Dharma Satya Nusantara Tbk. (DSNG) mempertahankan target kenaikan produksi minyak sawit mentah (*crude palm oil/CPO*) sebesar 10% pada tahun ini.

DSNG optimistis harga CPO merangkak naik pada semester II/2023. Perkembangan pasokan minyak nabati global dan prospek permintaan tetap memainkan peran penting dalam pembentukan harga.

“Gapki dalam sejumlah kesempatan memprediksi kenaikan harga CPO pada semester II/2023 meskipun tidak setinggi pada kuartal I/2022. Ada sejumlah faktor yang bisa memengaruhi harga CPO di antaranya *supply-demand*, iklim, transportasi, hingga produksi minyak nabati lainnya yang menjadi substitusi

terutama minyak kedelai,” kata Direktur Dharma Satya Nusantara Jenti Widjaja kepada *Bisnis*, Rabu (5/7).

Pasokan minyak sawit Indonesia masih dibayangi risiko iklim dari fenomena El Nino. Sebagai catatan, produksi tandan buah segar (TBS) dari kebun inti DSNG pada kuartal I/2023 naik hampir 30% secara tahunan.

Kenaikan disebabkan oleh pemulihan perkebunan sawit perusahaan di wilayah Kalimantan Timur yang sempat terimbas fenomena El Nino pada 2019—2020.

Memasuki kuartal II/2023 hingga Mei 2023, DSNG melaporkan tren kenaikan produksi yang berlanjut dibandingkan dengan tahun lalu. Namun, Jenti mengakui bahwa kenaikan pada kuartal II/2023 tak melampaui kuartal I/2023.

“Untuk 2023, kami belum merevisi target kenaikan produksi sebesar 10% meskipun terdapat risiko El Nino. Secara historis, memang produksi pada semester II/2023 lebih tinggi,” lanjutnya.


Terlepas dari perkembangan produksi yang diselimuti ketidakpastian, prospek permintaan minyak sawit masih cukup tinggi baik di dalam negeri maupun luar negeri. Hal ini terutama ditopang oleh kebutuhan pangan.

Selain itu, dia mengantisipasi peluang kenaikan permintaan menjelang Pemilihan Umum 2024 meskipun pasar belum memperlihatkan sinyal peningkatan *demand*.

“Menjelang Pemilu 2024, mungkin saja terjadi peningkatan permintaan meskipun tidak sebesar hari raya,” katanya. *(lim F. Timorria)*

Dokumentasi

**BIRO HUMAS DAN INFORMASI PUBLIK  
KEMANTAN**

Title	El Nino Moderat, Suhu Capai Rekor Terpanas	
Date	6 Juli 2023	
Media	Kompas	
Page	5	
Author	AIK	

## *El Nino Moderat, Suhu Capai Rekor Terpanas*

Laporan terbaru Organisasi Meteorologi Dunia (WMO) menyebutkan kemungkinan 90 persen fenomena El Nino kategori moderat berlanjut pada paruh kedua 2023. Dunia perlu mengantisipasi dampak lonjakan suhu global dan perubahan pola cuaca. Laporan itu dirilis pada Selasa (4/7/2023). "Awal El Nino meningkatkan kemungkinan pecahnya rekor suhu," kata Sekretaris Jenderal WMO Petteri Taalas. (AIK)

Title	Peningkatan Produksi dan Hilirisasi Karet Krusial
Date	6 Juli 2023
Media	Kompas
Page	11
Author	NSA/ITA/RAM



Kementerian Pertanian

# Peningkatan Produksi dan Hilirisasi Karet Krusial

Penyelamatan industri karet nasional mendesak dilakukan karena menyangkut nasib ribuan petani dan tenaga kerja yang terlibat di dalamnya.

**MEDAN, KOMPAS** — Peluang bisnis karet di pasar dunia masih sangat besar. Indonesia harus meningkatkan produksi dan merealisasikan hilirisasi untuk menyelamatkan industri karet nasional yang kini terpuruk.

Indonesia merupakan negara penghasil karet terbesar kedua di dunia setelah Thailand. Ada 2,9 juta petani karet di Indonesia yang sumber ekonominya bergantung pada kebun karet seluas 3,6 juta hektar.

Namun, dalam beberapa tahun terakhir ini para petani menambang tanaman karet yang menggantinya menjadi tanaman lain. Hal itu dipicu harga karet yang menurun dan produktivitas rendah karena tanaman karet sudah tua.

Petani tidak punya modal untuk peremajaan. Mereka juga tidak bisa menunggu selama lima tahun tanpa penghasilan, sampai tanaman karet yang baru menghasilkan getah lagi.

"Produksi karet petani terus merosot dan pabrik karet remah satu per satu tutup. Ini masalah sangat serius," kata Ketua Dewan Karet Indonesia A Aziz Pane, Rabu (5/7/2023).

Dewan Karet Indonesia pernah mengusulkan skema kerja sama antara perusahaan dan petani. Selain itu, pemerintah juga didorong memberikan bantuan kepada petani karet. Namun, hal itu tak terlaksana.

Peremajaan karet krusial

meningkatkan produktivitas kebun karet Indonesia sangat rendah, hanya 300 kilogram karet remah per hektar per tahun. Angka ini jauh di bawah negara penghasil karet lain yang mencapai 1.300 kilogram per hektar per tahun. Produktivitas yang rendah membuat dampak penurunan harga di tingkat petani semakin besar.

Dengan produktivitas yang lebih baik, peluang bisnis industri karet di pasar dunia sebenarnya masih sangat besar. Beberapa negara saat ini justru melakukan ekspansi kebun karet, seperti Vietnam, Laos, Kamboja, dan Pantai Gading.

## Hilirisasi

Aziz mengatakan, hilirisasi karet di Indonesia juga masih punya peluang yang sangat besar. Namun, pemerintah harus melakukan berbagai upaya untuk mendorong hilirisasi. Sekitar 85 persen produksi karet diekspor, hanya 15 persen yang diserap di dalam negeri.

Industri yang paling banyak menyerap karet remah adalah industri ban, yakni sekitar 75 persen dari total produksi karet nasional. Indonesia menjadi basis produksi ban dari berbagai perusahaan multinasional ataupun nasional. Ban dari Indonesia diekspor terutama ke Jepang, Amerika Serikat, Eropa, dan China. Untuk menambah serapan dari industri ban, pe-

merintah perlu mendorong investasi pabrik ban.

Industri ban vulkanisir juga mempunyai peluang sangat besar. Ban vulkanisir juga menyerap karet remah dalam jumlah besar. Jika industri ban dikuasai oleh perusahaan-perusahaan besar, usaha ban vulkanisir didominasi industri kecil dan menengah.

"Namun, industri ban vulkanisir di Indonesia tidak berkembang," kata Aziz.

Padahal, negara-negara maju saja, seperti Jepang, Eropa, dan Amerika Serikat, mempunyai industri ban vulkanisir yang sangat besar. Ban vulkanisir harganya hanya sekitar 50 persen dari ban baru, tetapi kualitasnya mencapai 80 persen. Ban vulkanisir kurang bisa diterima pasar di Indonesia karena kualitasnya perlu diperbaiki.

Selain itu, ada sejumlah produk yang bisa menyerap karet, seperti *dock fender* (karet penahan benturan di pelabuhan), pipa air, dan papan rambu lalu lintas. Produk-produk ini banyak digunakan di Indonesia, tetapi sebagian besar diimpor dari luar. Proyek pemerintah saja banyak yang mengimpornya dari luar.

"Kebijakan tentang tingkat komponen dalam negeri seharusnya digalakkan," kata Aziz.

Sekretaris Eksekutif Gabungan Perusahaan Karet Indonesia (Gapkindo) Sumut Eddy

Irwansyah mengatakan, di Medan, hilirisasi karet terus dilakukan untuk meningkatkan penyerapan dalam negeri. Selain pabrik ban, di Medan juga ada pabrik alas kaki, ban vulkanisir, sarung tangan karet, hingga *dock fender*.

## "Replanting" terhenti

Di Jambi, wajah karet rakyat kian suram, ditandai berhentinya program peremajaan karet atau *replanting* mulai tahun ini. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jambi Agusrizal mengatakan, program ini distop karena tidak ada lagi petani karet yang mau menanam.

Dinas Perkebunan Jambi telah menawarkan program peremajaan lahan 250 hektar. Namun, semuanya akhirnya dialokasikan bagi peremajaan sawit.

Ia menyebut petani karet sudah setengah hati mengurus kebunnya karena harga panen terus rendah. Ada pula petani yang mengalihkan kebunnya untuk budidaya sawit.

Pihaknya telah mempertemukan petani, buruh, dan perusahaan pengolah karet untuk bersama-sama mencari solusi akan lesunya sektor karet di Jambi. Sejumlah masukan telah diberikan. Terkait itu, akan ada tim khusus mendalami persoalan di lapangan. Lalu, tim akan merancang solusinya.

Konfederasi Serikat Buruh Indonesia (KSBI) Provinsi

Jambi mengkritik pemerintah lamban menyikapi masalah harga karet yang tak kunjung membaik. Akibatnya, petani makin tak bersemangat mengurus karet dan beralih ke budidaya lain. Pabrik menjadi kekurangan bahan baku dan berhenti beroperasi.

"Jika dibiarkan, karet rakyat di Jambi bisa punah," ujar Mas-ta Melda, Ketua KSBI Jambi.

Lebih lanjut kata Agus, tim akan menginventarisasi potensi kelompok petani karet yang tersisa. Saat ini ada 80 unit usaha pengolahan bahan olah karet di Jambi. "Akan kami dorong untuk bermitra langsung dengan pabrik," tambahnya.

Saat ini lebih dari 800 buruh pabrik karet di Jambi dirumahkan karena dua pabrik tutup dan sembilan lainnya menjalankannya efisiensi.


Sementara itu, Ketua Gapkindo Sumsel Alex Kurniawan Eddy berharap ada tindak lanjut dari pemerintah pusat untuk menangani permasalahan ini. "Sebab, masalah ini juga berkaitan dengan nasib petani dan tenaga kerja yang terlibat di dalamnya," ucap Alex.

Salah satunya adalah memberikan kemudahan bagi para petani untuk melakukan peremajaan karet. "Memang dibutuhkan keberpihakan dari semua pihak agar industri karet kembali bergeliat," ujarnya.

(NSA/ITA/RAM)

Dokumentasi

BIRO HUMAS DAN INFORMASI PUBLIK  
KEMANTAN

Title	732 Hektare Lahan Produktif Mulai Kritis	 Kementerian Pertanian
Date	6 Juli 2023	
Media	Jawa Pos	
Page	5	
Author	Elo/C14/ris	

# 732 Hektare Lahan Produktif Mulai Kritis

## Imbas Kemarau, Wilayah Jatim Dilanda Kekeringan

**SURABAYA** – Tidak hanya mulai memicu krisis air di kawasan permukiman, musim kemarau ekstrem juga mulai berdampak terhadap sektor pertanian di sejumlah wilayah di Jawa Timur (Jatim).

Tercatat, hingga pekan pertama Juli, 732 hektare lahan produktif mulai mengalami paceklik air. Diperkirakan, jumlahnya masih bisa bertambah. Sebab,

puncak kemarau terjadi bulan depan.

Berdasar laporan yang diterima Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Jatim, seluruh lahan produktif yang paceklik air itu tersebar di sejumlah wilayah. Bahkan, beberapa lahan berujung puso alias gagal panen.

Misalnya, yang terjadi di Lamongan. Di antara 702 hektare area sawah di sana, 13 hektare sawah gagal panen. Situasi sama terjadi di Jombang. Ada 2 hektare sawah yang sulit mendapat air sehingga puso.



- Ada 27 kabupaten/kota yang rawan krisis air.
- Tersebar di 844 desa/kelurahan di 221 kecamatan.

- Klasifikasi potensi krisis air meliputi:
  - 500 desa/kelurahan kering kritis
  - 253 desa/kelurahan kering langka
  - 91 desa/kelurahan kering langka terbatas



GRAPIS: ADITI/JAWA POS


Kepala DPKP Jatim Dydik Rudy menyatakan, pihaknya memberi peringatan awal sejak April. Khususnya bagi petani di wilayah rawan kekeringan. "Kami sudahimbau melakukan penanaman

dengan bibit benih yang tahan kekeringan. Kami juga meminta daerah mengoptimalkan pompa air yang ada," paparnya.

DPKP mengimbau para petani agar mengikuti asu-

ransi usaha tani padi. Jadi, ketika terjadi bencana kekeringan, mereka bisa melakukan klaim. "Yang nantinya bisa jadi tambahan untuk ongkos produksi pada masa tanam selanjutnya," katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air (DPUSDA) Jatim Baju Trihaksoro mengungkapkan, saat ini pemerintah pusat sudah melakukan proses lelang untuk pembangunan irigasi. Khususnya di wilayah Jatim yang berpotensi kekeringan. **(elo/c14/ris)**

Title	Bapanas-BRIN Perkuat Riset dan Inovasi Pangan	 Kementerian Pertanian
Date	6 Juli 2023	
Media	Investor Daily	
Page	12	
Author	Dho	

## Bapanas-BRIN Perkuat Riset dan Inovasi Pangan

**BOGOR, ID**—Badan Pangan Nasional/National Food Agency (Bapanas/NFA) menggandeng Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) untuk memperkuat kebijakan pangan berbasis riset dan inovasi. Kerja sama kedua pihak di antaranya meliputi penyediaan benih unggul hingga kecerdasan buatan (*artificial intelligence/AI*) untuk pengolahan data pangan. "Upaya pemerintah memperkuat ketahanan pangan nasional harus berjalan beriringan dengan pemanfaatan riset dan inovasi di bidang pangan. Untuk itu, penerapan kebijakan pembangu-

nan pangan berbasis riset, data, serta visi yang inovatif menjadi variabel kunci yang harus terus ditingkatkan," jelas Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi.

Saat Rakor dan Evaluasi Program dan Kegiatan Bapanas Tahun Anggaran 2023 di Bogor, Jawa Barat, pada 4 Juli 2023, Arief memaparkan, riset dan inovasi merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan dalam upaya memperkuat sektor pangan nasional. Karena itu, dalam kesempatan itu, Bapanas-BRIN sepakat memperkuat kerja sama ditandai dengan penandatanga-

nan nota kesepahaman (MoU) tentang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan hasil inovasi dan inovasi, serta kebijakan peningkatan pembangunan di bidang pangan. "Kita harap kolaborasi ini berdampak besar bagi kemajuan sektor pangan nasional, mengingat BRIN merupakan lembaga negara paling kredibel di bidang riset dan inovasi di Indonesia," ujar Arief.


Melalui kerja sama itu akan dijalankan berbagai program penguatan pangan, meliputi aspek ketersediaan dan stabilitas pangan, pengentasan rawan pan-

gan dan gizi, serta penganekegaran konsumsi dan keamanan pangan. Salah satu yang urgen dikerjakan bersama teman-teman BRIN adalah kerja sama pengembangan dan penyatuan data pangan dari mulai stok dan harga pangan di seluruh daerah. "Kita harus tahu persis berapa stok sembilan komoditas pangan di daerah, karena sangat krusial dan menentukan arah kebijakan," papar Arief dalam keterangan yang dikutip Rabu (05/07/2023). Sebelumnya, kerja sama Bapanas-BRIN telah berjalan untuk sejumlah program di antaranya

penyusunan standar mutu beras dan vanila, kajian posisi RI dalam Forum Codex Internasional, pemberian rekomendasi teknis penerbitan Sertifikat Penerapan Penanganan yang Baik (SPPB PSAT), hingga pengembangan AI untuk peramalan (*forecasting*) harga pangan, saat ini kerja sama tersebut masih terus berjalan.

Kepala BRIN Laksana Tri Handoko menyampaikan, BRIN siap mendukung penuh Bapanas, khususnya dalam membuat kebijakan berbasis sains dan data. Sebab, bicara pangan tanpa berbasis data dan angka berpotensi

menghasilkan kebijakan tidak tepat, terlebih Indonesia sebagai negara kontinen membutuhkan data yang akurat dan sah di setiap lokasi guna memastikan produksi, termasuk seluruh rangkaian *supply chain* pangan. BRIN juga turut mendukung kerja sama spesifik dalam bidang pangan antara BRIN Daerah dengan seluruh Dinas Urusan Pangan. "Jangan segan meminta dukungan BRIN Daerah guna mendukung implementasi kebijakan pangan, misalnya kajian detail, data, atau riset," kata Handoko. **(dho)**

Title	Hadapi Kemarau, Tiap Kabupaten Percepat Tanam Padi 1.000 Ha	 Kementerian Pertanian
Date	6 Juli 2023	
Media	Investor Daily	
Page	12	
Author	Tri Listyarini	

# Hadapi Kemarau, Tiap Kabupaten Percepat Tanam Padi 1.000 Ha

**JAKARTA, ID**—Guna menutupi potensi penurunan luas panen padi akibat kemarau panjang yang disebabkan fenomena El Nino, pemerintah telah meminta setiap kabupaten/kota di Indonesia melakukan percepatan tanam kurang lebih 1.000 hektare (ha). Luas panen padi nasional pada Januari-Agustus 2023 diproyeksikan 7,78 juta ha atau turun sekitar 0,89% dibanding periode sama 2022 yang mencapai 7,85 juta ha.

Oleh Tri Listyarini

**M**enurut Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, saat ini, dunia sedang tidak baik-baik saja karena fenomena El Nino menyerang seluruh negara dan menghantam 70% lahan-lahan pertanian secara global. Sumber NOAA dan International Research Institute for Climate and Society menyebutkan, mulai Agustus 2023, diprediksi El Nino menjadi dominan, dengan probabilitas 78-87%, diikuti dengan ENSO Netral dengan probabilitas di kisaran 13-20%. Sementara itu, BMKG memprediksikan, El Nino akan terjadi pada semester II-2023 dengan kategori lemah-moderat dan saat ini sebagian wilayah Indonesia telah masuk musim kemarau. "Karena itu, saya minta Pak Kadis (Pangan/Pertanian) untuk membuat percontohan percepatan tanam 1.000 ha, mengejar sisa hujan, ini menjadi lokomotif, saya butuh 540 ribu ha untuk menghadapi El Nino," ungkap Syahrul.

Secara rinci, jelas Syahrul, terdapat sembilan upaya antisipasi dan adaptasi El Nino di sektor pertanian yang dijalankan pemerintah melalui Kementerian Pertanian (Kementan). Pertama, identifikasi dan mapping lokasi terdampak kekeringan serta

## Luas Panen dan Produksi Padi Indonesia

Periode	Luas Panen (Juta Hektare)	Produksi Padi (Juta Ton GKG)
2018	11,38	59,2
2019	10,68	54,6
2020	10,66	54,65
2021	10,41	54,42
2022	10,45	54,75

GKG adalah gabah kering giling. Sumber: BPS, Bapenas



mengelempokkan menjadi daerah merah, kuning, dan hijau. Kedua, percepatan tanam untuk mengejar sisa hujan. Ketiga, peningkatan ketersediaan alsintan untuk percepatan tanam. Keempat, peningkatan ketersediaan air dengan membangun/memperbaiki embung, dam parit, sumur dalam, sumur resapan, rehabilitasi jaringan irigasi tersier, serta pompanisasi. Kelima, penyediaan benih tahan kekeringan dan organisme pengganggu tanaman (OPT). Keenam, program 1.000 ha per kabupaten/kota. Ketujuh, pengembangan pupuk organik terpusat dan mandiri. Kedelapan, dukungan pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan asuransi pertanian. Kesembilan, penyiapan lumbung pangan sampai tingkat desa. "Saat El Nino, kabupaten yang berhasil adalah yang melakukan *stocking*, karenanya tidak ada kabupaten tanpa lumbung

pangan," jelas dia.

Dirjen Tanaman Pangan Kementan Suwandi menambahkan, Kementan telah melakukan *mapping* untuk daerah-daerah yang sangat rawan terhadap kekeringan dengan memberinya warna merah, daerah moderat atau masuk zona hati-hati dengan warna kuning, dan zona aman dengan warna hijau. "Dari *mapping* yang sudah Kementan lakukan, sekitar 24-40 kabupaten di Indonesia dalam posisi siap siaga dan masuk radar *early warning* karena memang telah menjadi langganan kekeringan dan 80-90 kabupaten masuk daerah kuning. Yang menjadi fokus adalah yang rawan kekeringan, kami sudah kerahkan Brigade El Nino," jelas Suwandi. Untuk daerah yang masih memiliki sisa air, Kementan telah mencanangkan gerakan percepatan tanam dan bagi yang sudah tidak memungkinkan

disarankan untuk menanam palawija, seperti jagung, kedelai, atau kacang hijau.

Suwandi menuturkan, untuk percepatan tanam, maksimal dua minggu atau idealnya 10 hari atau paling cepat tujuh hari setelah panen maka lahan sawah langsung diolah. Upaya ini perlu dibarengi dengan penyediaan benih genjah tahan kekeringan dan tahan hama penyakit dan juga langkah lainnya, seperti mekanisasi dan juga penggalakan asuransi usaha tani padi (AUTP) agar ketika benar-benar puso bisa mengajukan klaim Rp 6 juta per ha. "Dalam percepatan tanam ini, kami menggunakan sistem gendong. Artinya, untuk daerah-daerah sentra seperti Karawang dan Indramayu tentu bisa melakukan percepatan tanam 5.000-7.000 ha, ini bisa menutupi kekurangan di daerah yang bukan sentra. Kalau 1.000 ha dikalikan 500 kabupaten/kota

yang melakukan percepatan tanam maka upaya ini bisa menjaga dan mempertahankan target-target produksi yang sudah ada," tandas Suwandi.


Suwandi mengatakan, saat ini, beberapa daerah di Tanah Air memang sudah terjadi kekeringan, namun beberapa daerah lainnya juga masih ada hujan. Berbagai sumber yang diacu Kementan menyebutkan, puncak kering atau kemarau terjadi pada Agustus-September dan setelahnya mulai menurun, skala El Nino masuk kategori moderat-menengah. BMKG juga telah mengeluarkan peringatan dini kekeringan meteorologis dengan klasifikasi waspada untuk beberapa kabupaten di Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara Timur, klasifikasi siaga untuk beberapa kabupaten di Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara Barat, sedangkan klasifikasi awas untuk kabupaten di Jawa Timur dan Nusa Tenggara Barat.

### Ketersediaan Beras

Sementara itu, berdasarkan data Kerangka Sampel Area Badan Pusat Statistik (KSA BPS) untuk amatan Mei 2023, realisasi luas panen padi pada Januari-Mei 2023 mencapai 5,18 juta ha dan potensi pada Juni-Agustus 2023 adalah 2,6 juta ha, proyeksi total 7,78 juta ha. Realisasi produksi padi pada Januari-

Mei 2023 sebesar 27,2 juta ton gabah kering giling (GKG) dan potensi Juni-Agustus 2023 sekitar 12,98 juta ton GKG, proyeksi total 40,19 juta ton GKG. Realisasi produksi beras Januari-Mei 2023 sebesar 15,68 juta ton, potensi Juni-Agustus 2023 sebesar 7,48 juta ton, proyeksi total 23,15 juta ton. Dengan proyeksi konsumsi pada Januari-Agustus 2023 sebesar 20,34 juta ton beras, surplus beras pada periode itu diperkirakan 2,81 juta ton.

Masih merujuk data KSA BPS amatan Mei 2023, dalam bahan paparan Kementan saat diskusi bertajuk Meskipun El Nino, Bisa Panen yang dipantau *Investor Daily* dari kanal media sosial Perhimpunan Meteorologi Pertanian Indonesia (Perhimpni) pada Rabu (05/07/2023), sepanjang Januari-Agustus 2023, pada Januari defisit 1,2 juta ton, Februari surplus 0,32 juta ton, Maret surplus 2,58 juta ton, April surplus 1,06 juta ton, Mei surplus 0,22 juta ton, Juni berpotensi defisit 0,07 juta ton, Juli berpotensi surplus 0,08 juta ton, dan Agustus berpotensi defisit 0,18 juta ton. Sedangkan berdasarkan angka tetap KSA BPS, luas panen Januari-Agustus 2022 sekitar 7,85 juta ha dengan produksi padi 41,1 juta ton GKG dan produksi beras 23,66 juta ton. Realisasi produksi padi 2022 sebesar 54,75 juta ton GKG, tahun ini ditargetkan 54,5 juta ton GKG.


Title	Seminar Pencegah Stunting	 Kementerian Pertanian
Date	6 Juli 2023	
Media	Investor Daily	
Page	12	
Author	Ant	



ANT

### Seminar Pencegahan *Stunting*

Guru Besar Pangan dan Gizi Institut Pertanian Bogor (IPB) Ali Khomsan (kedua kanan), Wakil Bupati Kabupaten Banyuasin Slamet Somosentono (ketiga kanan), Penata KKB Ahli Madya BKKBN Pusat Slamet Sutiyono (ketiga kiri), Nestle Dancow FortiGro Brand Executive Riana Agustini (kanan), Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuasin Rini Pratiwi (kedua kiri), dan pejabat lainnya berbincang usai membuka Seminar Gizi Pencegahan *Stunting* Nestle Dancow FortiGro di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, kemarin. Seminar yang diikuti 300 peserta tersebut diselenggarakan dalam rangka Hari Keluarga Nasional (Harganas) 2023 untuk meningkatkan pengetahuan para orang tua tentang *stunting*, mulai dari dampaknya bagi anak usia sekolah, bagaimana cara pencegahan *stunting* hingga mengenalkan kebiasaan sehat melalui konsumsi protein hewani.

Title	Irigasi Bagus Selamatkan Tanaman Padi di Bali	 Kementerian Pertanian
Date	6 Juli 2023	
Media	Media Indonesia	
Page	8	
Author	Ruta Suryana	

*Saat memasuki musim kemarau, para petani disarankan menanam palawija dan tidak menanam padi agar tidak puso.*

# Irigasi Bagus Selamatkan Tanaman Padi di Bali

**RUTA SURYANA**  
ruta@mediaindonesia.com

**T**ANAMAN padi di utara Bali, tepatnya di Kabupaten Buleleng, hingga kini masih aman dari ancaman kekeringan. Sebelumnya Kabupaten Buleleng diprediksi mengalami kekeringan sejak Juni. Namun, sejak Juni hingga sekarang masih ada hujan sehingga tanaman padi tetap mendapatkan air.

Klian Subak Yangai, Desa Bungkulun, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng, I Nyoman Sukraidi mengatakan tanaman padi di lahan subak seluas 50 hektare kini tumbuh subur akan memasuki masa panen awal September mendatang.

"Tanaman padi masa tanam kedua ini masih aman dari an-

caman kekeringan dan akan mulai panen awal September nanti," ujar Sukraidi, kemarin.

Salah satu cara menyiasati agar mendapatkan air yang cukup, yaitu dengan tetap menerapkan pengaturan penggunaan air yang bersumber dari Bendungan Tamblang.

Dia juga memastikan, jika kondisinya seperti sekarang, pada masa tanam ketiga pun diyakini akan aman dan bebas dari ancaman kekeringan.

Sebaliknya, pasokan air untuk pertanian di Kabupaten Garut terus berkurang sehingga tidak cukup untuk mengairi padi. Pemkab Garut melalui dinas pertanian setempat telah mengeluarkan imbauan agar para petani tidak menanam padi selama musim kemarau ekstrem.

Kepala Dinas Pertanian Ka-

bupaten Garut Beni Yoga mengatakan para petani diimbau tidak menanam padi untuk mencegah gagal panen dan kerugian.

"Kami melakukan pendampingan pada petani yang sudah tanam awal. Kami menyarankan agar para petani menanam palawija karena tidak membutuhkan banyak air. Seperti singkong, ubi, kacang tanah yang tidak membutuhkan banyak air," kata Beni Yoga.

Petani di Desa Lamtamot, Kecamatan Lembah Seulawah, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh, mempercepat tanam padi agar tidak kekurangan air.

"Kalau biasanya umur bibit di persemaian sampai 20 hari, kali ini baru usia 15 hari atau dua pekan langsung ditanam atau dipindah ke petak sawah lebih luas. Walaupun bibit ma-

sih kecil rawan serangan keong emas, tidak bisa ditunda lagi karena krisis air sangat rawan" kata Muslim, petani di Lembah Seulawah.

## Lumbung beras aman

Provinsi Bangka Belitung diprediksi mengalami kekeringan dampak fenomena El Nino. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Babel, Edi Romdhoni, mengatakan hal tersebut secara umum tidak berpengaruh terhadap lumbung beras di Kabupaten Bangka Selatan.

Tren suhu udara di Malang Raya meliputi Kota Malang, Kabupaten Malang dan Kota Batu, Jawa Timur, mengalami kenaikan signifikan. Peningkatan temperatur udara berimbas pergeseran budi daya buah apel ke buah jeruk.

Andang Kurniawan, pengamat meteorologi dan geofisika Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Klimatologi Jatim mengatakan kenaikan suhu udara di Malang Raya semula 28 derajat celsius pada 1990 naik menjadi 28,5 derajat celsius pada 2020.

Pada bagian lain, Kementerian Pertanian memilih Kabupaten Dairi, Sumatra Utara, menjadi tempat pengembangan hortikultura pertanian lahan kering atau *horticulture development dryland area project* (HDDAP).

Ada enam kecamatan dan 12 desa yang akan melaksanakan program HDDAP, dengan menanam empat komoditas yaitu bawang merah, cabai, sayuran dan wortel di lahan kering. (AD/BN/MR/RF/AP/JS/N-1)

Title	Bahas Tata Niaga Komoditi Pinang di Tanjabbar
Date	6 Juli 2023
Media	Tribun Jambi
Page	3
Author	Adv



Kementerian Pertanian

# Bahas Tata Niaga Komoditi Pinang di Tanjabbar

## ● Bupati Anwar Sadat Lakukan Pertemuan dengan Gubernur

JAMBI - Bupati Tanjab Barat Drs H Anwar Sadat MAG lakukan pertemuan bersama Gubernur Jambi membahas tata niaga komoditi pinang di Kabupaten Tanjab Barat yang digelar di Ruang Kerja Rumah Dinas Gubernur Jambi, Selasa (4/7).

Dalam pertemuan tersebut, bupati didampingi Kepala Bappeda Tanjab Barat, Dr Katamso SA SE ME, turut hadir juga Plh Asisten II Provinsi Jambi Johansyah, Karo Hukum Ali Zaini dan Kadis Perkebunan Provinsi Jambi Agus Rizal.

Diwawancarai usai kegiatan, bupati mengatakan anjloknya harga pinang beberapa bulan terakhir membuat masyarakat resah, maka dari itu Pemkab Tanjab Barat berkoordinasi dengan Gubernur Jambi.

Lebih lanjut, Bupati menyampaikan pada prinsipnya Pemerintah Kabupaten Tanjab Barat proaktif mengambil peran agar iklim ekspor pinang semakin kondusif. Saat ini pajak tata niaga pinang yang naik melambung tinggi di tempat impor, seperti India yang pajaknya naik 100,8 persen.

"Kita bersama Gubernur secepatnya akan menghadap Kementerian Perdagangan di Jakarta untuk membicarakan pajak tata niaga yang naik melambung tinggi di tempat impor tujuan pinang." Kata bupati.

Selain itu juga, akan melakukan harga jaminan pinang sehingga tidak bisa dipermainkan oleh tengkulak. Bersama pihak provinsi berupaya akan mengeksport pinang dalam bentuk bulat dan setengah jadi.

"Ke depannya kita akan mengundang para investor untuk melakukan hal-hal tersebut, sehingga masyarakat Kabupaten Tanjab Barat ada jaminan harga pinang yang dapat membantu perekonomian."

Diakhir wawancara Bupati mengimbau kepada masyarakat Kabupaten Tanjab Barat khusus masyarakat perkebunan pinang untuk bersabar.

"Kebun pinang yang ada jangan ditebang dulu, Inshaallah ada jalan keluarnya. Saat ini kita lagi berupaya



BERTEMU GUBERNUR - Bupati Tanjab Barat Drs H Anwar Sadat MAG berbincang dengan Gubernur Jambi, Al Haris membahas tata niaga komoditi pinang di Kabupaten Tanjab Barat, Selasa (4/7) di Ruang Kerja Rumah Dinas Gubernur Jambi.




semaksimal mungkin agar ada kepastian harga pinang sesuai standar.

Pada kesempatan yang sama Plh Asisten II Provinsi Jambi Johansyah menyampaikan Sabtu nanti, Provinsi Jambi mengadakan acara gebyar di gedung Sarinah Jakarta yang akan dibuka oleh Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. Pada kesempatan tersebut, akan dilaporkan kondisi harga pinang saat ini rendah.

"Secara teknisnya nanti ada

pertemuan yang sudah diarahkan oleh Gubernur. Kita juga akan mengundang pengusaha pinang dan perwakilan negara sahabat yang menjadi tempat ekspor pinang kita, selain itu juga kita akan laporkan kepada Menteri Pertanian dan Dirjenbun agar komoditi pinang seperti kelapa sawit ada penetapan harga yang kita tetapkan bersama dari pengusaha dan asosiasi petaninya." Pungkasnya.(adv)

Title	Belum Dinyatakan KLB	 Kementerian Pertanian
Date	6 Juli 2023	
Media	Tribun Jogja	
Page	11	
Author	Alx	

## Belum Dinyatakan KLB

**PEMERINTAH** Kabupaten Gunungkidul melakukan berbagai langkah untuk mengendalikan Antraks. Langkah dilakukan usai ada temuan di Pedukuhan Jati, Kalurahan Candirejo, Semanu hingga menimbulkan korban jiwa.

Wakil Bupati Gunungkidul Heri Susanto menyatakan pihaknya akan fokus pada penanganan Antraks di Pedukuhan Jati.

"Sesuai kesepakatan, kami fokus penanganan di sana dulu, dan terus melakukan koordinasi dengan berbagai pihak," kata Wabup Heri, Rabu (5/7).

Pihaknya belum akan mengeluarkan kebijakan khusus seperti penutupan pasar hewan atau penetapan status Kejadian Luar Biasa (KLB). Sebab te-

muan Antraks sejauh ini hanya terjadi di Pedukuhan Jati.

Heri pun berharap kejadian ini jadi pelajaran bagi warganya. Terutama untuk tidak menyembelih dan mengonsumsi ternak yang sakit atau bahkan mati mendadak.

"Jaga kebersihan lingkungan juga, terutama di sekitar kandang, mengingat spora Antraks ini bisa bertahan di tanah," ujarnya.

Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (DPKH) Gunungkidul, Wibawanti Wulandari mengatakan lokalisasi ternak dari Pedukuhan Jati sudah dilakukan sejak temuan dilaporkan.

Lokalisasi bertujuan membatasi pergerakan ternak keluar dari wilayah terindikasi Antraks. Warga setempat pun

juga diberikan edukasi tentang pencegahan Antraks.

"Kami juga lakukan surveilans, antibiotik, hingga vaksin untuk ternak di Pedukuhan Jati," kata Wibawanti.

Kepala Balai Besar Veteriner (BB-Vet) Yogyakarta, Hendra Wibawa mengatakan Kementerian Pertanian (Kementan) sudah dilibatkan langsung untuk penanganan Antraks di Semanu.

Kementan telah menyalurkan bantuan berupa obat-obatan, vitamin, hingga desinfektan untuk pencegahan Antraks. Tim dari Kementan ikut dalam investigasi kasus Antraks di Semanu ini.

"Nanti akan ada surveilans setiap tahun agar Antraks ini bisa terkendali dan tidak meluas," jelas Hendra. **(alx)**

Title	NTP Jatim Baik 0,36 dan NTUP Naik Sebesar 0,55 Persen
Date	6 Juli 2023
Media	Harian Bhirawa
Page	10
Author	Rac.bb



Kementerian Pertanian

## NTP Jatim Baik 0,36 dan NTUP Naik Sebesar 0,55 Persen

### Pemprov, Bhirawa

Nilai Tukar Petani (NTP) Jawa Timur bulan Juni 2023 naik 0,36 persen dari 107,39 menjadi 107,78. Dan ada dua subsektor pertanian mengalami kenaikan NTP dan tiga subsektor lainnya mengalami penurunan NTP.

Kenaikan NTP ini disebabkan karena indeks harga yang diterima petani (It) naik sebesar 0,63 persen, atau lebih tinggi dibandingkan indeks harga yang dibayar petani (Ib) yang naik sebesar 0,27 persen. Hal itu disampaikan Kepala BPS Jatim, Zulkipli.

Lebih lanjut, dijelaskannya, subsektor yang mengalami kenaikan NTP tertinggi yaitu subsektor Hortikultura sebesar 2,40 persen dari 117,78 menjadi 120,60. Diikuti subsektor Peternakan sebesar 1,50 persen dari 103,43 menjadi 104,97.

Sedangkan subsektor yang mengalami penurunan NTP tertinggi yaitu subsektor Perikanan sebesar 0,65 persen dari 99,70 menjadi 99,05. Diikuti subsektor Tanaman Pangan sebesar 0,43 persen dari 108,30 menjadi 107,83, dan subsektor Tanaman Perkebunan Rakyat sebesar 0,11 persen dari 101,04 menjadi 100,93.

Zulkipli menjelaskan dari lima provinsi di Pulau Jawa yang melakukan penghitungan NTP pada bulan Juni 2023, seluruhnya

mengalami kenaikan NTP dengan kenaikan tertinggi di Provinsi Banten sebesar 0,85 persen.

Diikuti Jawa Tengah sebesar 0,67 persen, Jawa Barat sebesar 0,54 persen, Jawa Timur sebesar 0,36 persen, dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar 0,19 persen.

Sebagai informasi, NTP adalah perbandingan It terhadap Ib. NTP merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan/daya beli petani di perdesaan.

NTP juga menunjukkan daya tukar (terms of trade) dari produk pertanian

dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi.

Ia juga menjelaskan, Pada Juni 2023, NTUP naik sebesar 0,55 persen. Hal ini terjadi karena It naik sebesar 0,63 persen lebih tinggi dibandingkan kenaikan indeks BPPBM sebesar 0,08 persen. Untuk subsektor Hortikultura sebesar 2,56 persen, subsektor Peternakan sebesar 1,52 persen, dan subsektor Tanaman Perkebunan Rakyat sebesar 0,10 persen.

Sedangkan Subsektor yang mengalami penurunan NTUP tertinggi terjadi pada subsektor Perikanan sebesar

0,54 persen, diikuti subsektor Tanaman Pangan sebesar 0,17 persen.

Sekedar diketahui, Nilai Tukar Usaha Rumah Tangga Pertanian (NTUP) merupakan perbandingan antara It dengan Ib dimana komponen Ib hanya meliputi Indeks BPPBM.


Secara konseptual, NTUP mengukur seberapa cepat perubahan harga komoditas yang dihasilkan dan dijual oleh Petani dibandingkan dengan perubahan harga komoditas/barang yang digunakan untuk proses produksi dan penambahan barang modal. [rac.bb]



Peserta program jangkam besi menerima bantuan sembako.

Dokumentasi

**BIRO HUMAS DAN INFORMASI PUBLIK  
KEMANTAN**

Title	Pertumbuhan Ekonomi Meningkat	 Kementerian Pertanian
Date	6 Juli 2023	
Media	Satelit News	
Page	1 Part 1	
Author	Luthfi/Gatot	



LUTHFI/SATELIT NEWS

**KONFERENSI PERS:** Kakanwil DJPb Banten yang sekaligus menjabat sebagai Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Banten Sugiyarto pada saat konferensi pers, Rabu (5/7).

# Pertumbuhan Ekonomi Meningkat


## 4,68 Persen di Kuartal Pertama

**SATELITNEWS,** SERANG- Kantor Wilayah Direktorat Jendral (Ditjen) Perbendaharaan Negara Provinsi Banten mencatat pertumbuhan ekonomi Banten pada kuartal pertama 2023 mengalami peningkatan yang cukup tajam di angka 4,68 persen dibanding Q4 tahun 2022 yang berada

di angka 4,03 persen. Namun demikian masih lebih rendah jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi nasional dan pertumbuhan ekonomi beberapa provinsi lain di Pulau Jawa. Akan tetapi, pertumbuhan ekonomi Banten kuartal pertama 2023 menguat lebih tajam jika dibandingkan provinsi lain.

Kakanwil DJPb Banten yang

**BACA HAL 8**

Title	Pertumbuhan Ekonomi Meningkat	 Kementerian Pertanian
Date	6 Juli 2023	
Media	Satelit News	
Page	1 Part 2	
Author	Luthfi/Gatot	

# Inflasi Lebih Rendah dari Nasional

## ■ PERTUMBUHAN...

*Sambungan dari hal 1*

sekaligus menjabat sebagai Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Banten Sugiyarto pada saat konferensi pers, Rabu (5/7) mengatakan, share terbesar Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Banten sampai dengan kuartal pertama 2023 masih tetap dari sektor Industri Pengolahan sebesar 30,22 persen.

"Pertumbuhan pada Q1 2023 ini memasuki fase ekspansi setelah sebelumnya mengalami perlambatan. Pertumbuhan ini didorong oleh mulai meningkatnya permintaan domestik, permintaan ekspor dan perbaikan iklim usaha serta investasi di sektor ini," katanya.

Sementara itu, lanjutnya, tekanan Inflasi pada provinsi Banten terus menurun, pada bulan Mei tercatat 3,67 persen (yoy) atau 0,09 persen (mtm). Tingkat inflasi Banten lebih rendah jika dibandingkan dengan inflasi nasional dan sebagian besar kota-kota di Jawa. Penurunan inflasi Banten terjadi berkat dukungan dan kerja solid dari Tim Pengendalian inflasi Daerah.

Kemudian Indikator Kesejahteraan sebagian membaik yaitu Nilai Tukar Petani (NPT) bulan Mei 2023 sebesar 102,68 dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) bulan Februari 2023 sebesar 7,97% capaian tersebut lebih baik dibandingkan periode sebelumnya. "Sedangkan Nilai

Tukar Nelayan (NTN) bulan Mei 2023 sebesar 98,13, tidak lebih baik jika dibandingkan periode sebelumnya," ucapnya.

Terkait dengan realisasi belanja negara sampai dengan 31 Mei 2023 sebesar Rp9,18 Triliun atau 35,63 persen dari target APBN 2023 atau tumbuh 2,97 persen. Belanja APBN terdiri dari Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) dan Belanja Transfer ke Daerah (TKD). Belanja K/L Rp3,23 Triliun atau 34,88 persen dari Pagu, atau tumbuh 11,51 persen. Hal yang sama juga terjadi pada belanja TKD Rp5,94 T atau 36,05 persen dari Pagu, sedikit mengalami kontraksi sebesar 1,15 persen.

"Selain itu Pemanfaatan APBN di Banten pada Belanja Modal antara lain untuk beberapa Proyek Vital seperti Proyek Jalan Bebas Hambatan Serang-Panimbang (83,6 km) terutama pada seksi 3 yang didanai sepenuhnya dari APBN. Jalan tol tersebut ditargetkan beroperasi pada triwulan II Tahun 2024. pembangunan Waduk Karian, target dialiri air pada bulan September 2024 dan mengalir daerah seluas 21454 Ha serta sistem Penyediaan Air Minum Karian-Serpong dengan target 4600 Liter air per detik," jelasnya.

Kemudian untuk penyaluran Belanja Transfer Ke Daerah (TKD) mengalami sedikit mengalami kontraksi jika dibandingkan dengan periode yang sama di Tahun 2022. Akan tetapi, Dana Insentif Daerah (DID) mengalami peningkatan sebesar

16,28 persen. Selain itu, DAK Fisik tumbuh signifikan sebesar 110,72 persen jika dibandingkan tahun 2022. Dana ini telah disalurkan untuk Pemda Kab Lebak, Kab Pandeglang, Kab Serang, dan Kota Tangsel.


Penyaluran Dana Bagi Hasil juga tercatat lebih tinggi sebesar 39,04 persen dengan peningkatan tertinggi terdapat pada jenis DBH SDA Panas Bumi yang meningkat 354,14 persen dari Rp0,98 miliar menjadi Rp4,43 miliar. Kinerja penyaluran DAK Nonfisik naik 32,28 persen dengan penyaluran tertinggi ada pada Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebesar Rp1,12 triliun. Kinerja Dana Desa juga mengalami perbaikan karena terjadi pertumbuhan sebesar 7,70 persen.

"Ini menunjukkan bahwa kinerja perangkat desa meningkat karena mereka bisa memenuhi persyaratan dokumen penyaluran lebih cepat. Walaupun kinerja penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) mengalami pertumbuhan negatif sebesar 16,42 persen, akan tetapi sampai dengan akhir Mei 2023 telah terdapat penyaluran untuk DAU block grant dan DAU specific grant.

Hal tersebut disebabkan perubahan kebijakan alokasi DAU yang baru berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2022, namun demikian pemda merespon positif dan berdasarkan data terbaru, perkembangan realisasi TKD sudah mulai meningkat," jelasnya. (luthfi/gatot)

Dokumentasi

**BIRO HUMAS DAN INFORMASI PUBLIK  
KEMANTAN**

Title	Tak Bertele-tele Lagi, Digigit Anjing Langsung VAR	 Kementerian Pertanian
Date	6 Juli 2023	
Media	Nusa Bali	
Page	1 Part 1	
Author	Des	

Tahun 2024, Bali Target Nihil Kasus Kematian Akibat Rabies

## Tak Bertele-tele Lagi, Digigit Anjing Langsung VAR

Penanganan rabies kini sedang difokuskan pada vaksinasi anjing, total dari 599.000 populasi anjing di Bali yang ter vaksin sudah mencapai 51,45 persen

TABANAN, NusaBali  
Provinsi Bali mengencangkan penanganan rabies. Di tahun 2024 ditargetkan tak ada lagi kasus kematian akibat rabies,



Wamentan RI Harvick Hasnul Qolbi saat memakaikan kalung ke anjing yang sudah divaksin di Desa Kuku, Marga, Tabanan, Rabu (5/7).




Petugas memberikan vaksin rabies terhadap anjing milik warga.

dan di tahun 2028 Bali sudah dinyatakan bebas rabies. Kini jika ada masyarakat yang tergigit anjing atau hewan penular rabies (HPR), penanganannya dipastikan tak lagi bertele-tele, petu-

gas kesehatan bisa langsung memberikan VAR (Vaksin Anti Rabies).

"Hasil rakor minggu lalu bersama Dinas Kesehatan

*Bersambung ke Hal-15 Kolom 5*

Title	Tak Bertele-tele Lagi, Digigit Anjing Langsung VAR	 Kementerian Pertanian
Date	6 Juli 2023	
Media	Nusa Bali	
Page	1 Part 2	
Author	Des	

# Tak Bertele-tele Lagi, Digigit Anjing Langsung VAR

## SAMBUNGAN DARI HALAMAN 1

pemberian VAR tidak lagi menunggu HPR mati dua minggu. Pokoknya begitu digigit langsung dikasih VAR," tegas Kepala Dinas Pertanian Provinsi Bali, Wayan Sunada saat mendampingi Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Harvick Hasnul Qolbi memantau pelaksanaan vaksinasi rabies di Desa Kukuh, Kecamatan Marga, Tabanan, Rabu (5/7).

Terkait itu pihaknya kini gencar melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Masyarakat harus paham penanganan bila tergigit HPR segera minta VAR (Vaksin Anti Rabies) ke pelayanan kesehatan terdekat baik itu luka ringan, apalagi luka berat. Sunada memastikan ketersediaan VAR untuk manusia dan HPR mencukupi di Bali saat ini. Stok VAR untuk Bali saat ini tersedia 120.000 dosis dari jumlah itu 100.000 dosis bantuan dari Australia dan tanggal 9 Juli nanti sebanyak 30.000 dosis dari Pusvetma (Pusat Veterineri Farma) Surabaya.

"Stok VAR kita mencukupi, distribusi ke kabupaten/kota juga bertahap karena vaksin disimpan


dalam kondisi yang bagus," tegas Sunada yang juga didampingi Kadis Pertanian Tabanan, I Made Subagia. Sunada menambahkan penanganan rabies kini sedang difokuskan terutama vaksinasi pada anjing.

Secara keseluruhan dari 599.000 populasi anjing di Bali yang tervaksin sudah mencapai 51,45 persen. "Kita targetkan di tahun 2024 tidak ada lagi kasus orang meninggal karena rabies dan di tahun 2028 Bali bebas rabies," kata birokrat asal Desa Kukuh, Kecamatan Marga, Tabanan ini. Sementara itu Wamentan, Harvick Hasnul Qolbi mengatakan pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan Kemenkes terkait upaya bersama dalam penanganan rabies di seluruh daerah di Indonesia, khususnya Bali terutama pada pengadaan vaksin baik untuk HPR maupun ketersediaan VAR untuk kasus gigitan pada manusianya. Termasuk mendorong pemerintah daerah melalui dinas terkait terus melakukan sosialisasi dan edukasi bahaya rabies pada masyarakat.

"Kita harapkan di Bali bisa segera terkendali dalam waktu

dekat, sehingga jangan sampai targetnya di tahun 2028, kalau bisa tahun depan atau dua tahun ke depan bisa diatasi," harapnya. Terkait dengan distribusi vaksin, dirinya mengakui selalu berkoordinasi baik dengan Gubernur Bali maupun Kadis Pertanian Provinsi Bali dan Kadis Pertanian kabupaten/kota agar efektif, artinya jika tidak ada di kabupaten/kota namun adanya di provinsi semacam cold storage, kalau stok di kabupaten habis bisa diambil ke provinsi sesuai kebutuhan dan regulasinya diefisienkan. "Intinya kalau VAR mencukupi, justru kami konsen pada pascanya, penanganan lebih spesifik pada manusianya, jangan sampai nambah kasus gigitan positif lagi," tandasnya.

Kabid Peternakan dan Kesehatan Hewan, Distan Tabanan, drh Gde Eka Parta Ariana menegaskan capaian vaksin di Tabanan baru di angka 54,88 persen dengan target minimal cakupan 80 persen, dari total populasi anjing 62.104 ekor di Tabanan. "Sempat ditargetkan bulan Juni kemarin rampung 80 persen hanya saja ada kendala terutama di vaksin sehingga molor," tandasnya. **des**

Title	Disnakeswan NTB Bentuk Tim Antisipasi Masuknya Penyakit LSD	 Kementerian Pertanian
Date	6 Juli 2023	
Media	Radar Lombok	
Page	2	
Author	Rie	

# Disnakeswan NTB Bentuk Tim Antisipasi Masuknya Penyakit LSD

## Terkait Pemulangan Sapi Tidak Laku di Jabodetabek

**MATARAM** - Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) Provinsi NTB membentuk tim risiko penyakit hewan menular untuk merespons rencana pemulangan ribuan hewan kurban yang tidak laku terjual di kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek).

"Kami antisipasi masuknya penyakit LSD ke NTB," kata Kepala Disnakeswan Provinsi NTB Muhamad Riadi, Rabu (5/7).

Dikatakannya, pihaknya merespons cepat keluhan pedagang hewan kurban, yang menginginkan sapi-sapi mereka dipulangkan kembali ke NTB setelah tidak terjual hingga hampir satu minggu setelah Hari Raya Idul Adha.

Kondisi tersebut rupanya diatensi juga Kementerian Pertanian, melalui Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. Yang telah melakukan koordinasi bersama Disnakeswan NTB secara daring.

"Dipimpin langsung sekretaris Ditjen," ujarnya.

Riadi menyampaikan bahwa Sekretaris Ditjen akan melakukan koordinasi dengan sejumlah pihak di Jabodetabek dan mengupayakan sisa hewan ternak untuk kurban bisa diserap sejumlah BUMD, terutama BUMD dengan skala besar. Sehingga sisa hewan ternak kurban tidak harus kembali ke Provinsi NTB.

"Khawatirnya kalau pulang, bisa membawa penyakit LSD dan menular ke hewan ternak di NTB. LSD ini sudah menyebar di Pulau Jawa," beber Riadi.

Disebutkannya, jika sapi-sapi tersebut tidak habis terjual, Disnakeswan NTB juga telah menyiapkan langkah antisipasi kepulangannya.

Penanggung Jawab Tim drh Muslih mengatakan, antisipasi penyebaran Lumpy Skin Diseases atau LSD harus dilakukan, apalagi hingga saat ini Provinsi NTB masih zero kasus LSD.

"Itu yang kami jaga," kata Muslih.

Dalam koordinasi yang dilakukannya, ada beberapa poin yang telah disepakati. Antara lain, hewan ternak sapi yang kembali harus dipastikan berasal dari NTB. Hewan yang pulang harus lebih dulu dilakukan vaksin LSD di tempat asal, seperti Jawa - Barat dan Jakarta.


"Harus karantina juga selama 28 hari sebelum dilalulintaskan," jelasnya.

Selanjutnya, dilakukan PCR individual terhadap hewan ternak sapi. Paling lama dilakukan sebelum diangkut atau menggunakan kapal. Sebagai bentuk kewaspadaan, harus dilakukan penyemprotan untuk mematikan vektor.

"Tidak boleh lewat Bali juga, karena khawatir kena penyakit Jembrana," tutupnya. **(rie)**

Dokumentasi

**BIRO HUMAS DAN INFORMASI PUBLIK  
KEMANTAN**

Title	Bagikan 20.520 Vaksin LSD	 Kementerian Pertanian
Date	6 Juli 2023	
Media	Tribun Lampung	
Page	4	
Author	Byu	

# Bagikan 20.520 Vaksin LSD

## ■ Lili: Peternak Jangan Khawatir Tidak Kebagian

**BANDAR LAMPUNG, TRIBUN** - Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnak Keswan) Provinsi Lampung menyimpan 20.520 vaksin LSD (Lumpy Skin Disease) alokasi dari Kementerian Pertanian (Kementan) Republik Indonesia.

"Puluhan ribu vaksin LSD ini tersimpan di cool room Disnak Keswan Lampung," kata Kepala Disnak Keswan Lampung Lili Mawarti kepada Tribun, Rabu (5/7).

Lili mengatakan, pihaknya menargetkan dalam minggu ini semua vaksin LSD ini telah diambil oleh petugas Disnak Keswan kabupaten dan kota.

"Untuk itu, peternak jangan khawatir tidak kebagi-

an vaksin LSD," terang Lili. Lili menyebut, pada tahap 4 ini ada 100 ribu vaksin LSD yang dikirim dari Kementan kepada Disnak Keswan Lampung.

Sementara jumlah vaksin LSD yang telah didistribusikan kepada peternak sebanyak 79.480 dosis sampai dengan 4 Juli 2023.

Lili mengatakan, proses vaksinasi belum maksimal karena dalam dua minggu terakhir para petugas melakukan pengawasan dan pemeriksaan hewan kurban.

Penyakit LSD saat ini telah menjangkiti 11 daerah di Provinsi Lampung sebagaimana hasil uji laboratorium Balai Veteriner Lampung.

"Kasus LSD di Provinsi Lampung per tanggal 4 Juli

2023 ada sebanyak 1.265 ekor, dengan kematian akibat LSD tiga ekor, dan dilakukan potong bersyarat sembilan ekor," ujar Lili.

Ia mengatakan, ternak yang mengalami kesembuhan dari LSD sebanyak 961 ekor atau 76 persen.


"Sisa kasus ternak yang masih sakit atau dalam proses pengobatan ada 292 ekor. Kasus ini terjadi pada 82 desa dengan 43 kecamatan," ungkapnya.

Ia mengatakan, vaksin LSD yang diterima Provinsi Lampung untuk para ternak ada sebanyak 111.200 dosis.

Dengan empat tahapan, di antaranya tahap pertama 200 dosis, tahap kedua 1.000 dosis, dan tahap ketiga 10.000 dosis. **(byu)**

### Update LSD

- Kasus LSD di Provinsi Lampung per tanggal 4 Juli 2023 ada sebanyak 1.265 ekor.
- Dengan tingkat kematian akibat LSD tiga ekor, dan dilakukan potong bersyarat sembilan ekor.
- Ternak yang mengalami kesembuhan dari LSD sebanyak 961 ekor atau 76 persen.
- Sisa kasus ternak yang masih sakit atau dalam proses pengobatan ada 292 ekor.
- Kasus ini terjadi pada 82 desa dengan 43 kecamatan di Provinsi Lampung.
- Vaksin LSD yang diterima Provinsi Lampung untuk para ternak ada sebanyak 111.200 dosis.

Title	Dipimpin Langsung Mendagri	
Date	6 Juli 2023	
Media	Tribun Pekanbaru	
Page	12	
Author	Ton	

# Dipimpin Langsung Mendagri

## ● Pemkab Inhu Ikuti Rakor Inflansi Pertengahan Tahun 2023

**RENGAT, TRIBUN** - Staf Ahli Bupati Inhu Bidang Perencanaan dan Pembangunan, Joni Maryanto, bersama perwakilan Forkopimda dan dinas terkait mengikuti zoom meeting rapat koordinasi pengendalian inflansi pertengahan tahun 2023, di ruang VIP lantai empat kantor Bupati Inhu, Selasa (4/7) lalu.

Pada Rakor tersebut Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, menyampaikan hasil dari BPS, terjadi penurunan inflansi tahun ke tahun mulai Juni 2023 terhadap Juni 2022 lalu sebesar 3,52 persen serta inflansi bulan ke bulan dari uni 2023

terhadap bulan Mei 2023 sebesar 0,14 persen.

Selanjutnya, Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian (Kementan) RI melaporkan kenaikan harga daging ayam beras pada saat ini meningkat, namun potensi produksi daging ayam beras tahun 2023 stabil.

Dari informasi yang disampaikan ada beberapa kenaikan dari daging ayam beras, melihat dari struktur biaya produksi DOC ayam beras.

Sementara itu, Direktur Bisnis Perum dan Bulog RI, Febby Novita mewaspada fenomena kemarau dan el nino.


Diambil dari data BMKG yang memperkirakan adanya potensi kemunculan el nino di musim kemarau 2023 dengan puncak intensitas terjadi di bulan Agustus 2023.

"Hal ini akan berpengaruh terhadap penurunan pasokan dan kenaikan harga pasaran beras. Untuk itu, Bulog mengambil tindakan dengan mengelola stok CBP yang cukup untuk menjaga kekuatan intervensi pemerintah dan mengurangi potensi spekulasi harga pasar atas stok pemerintah, stok beras sejumlah 600.970 ton," ujarnya.

Menutup Rakor Inflansi di pertengahan tahun ini, Men-

dagri Tito Karnavian menjelaskan tentang pentingnya pemerintah mensosialisasikan kepada masyarakat Kegiatan Gerakan Pangan Murah (GPM) bertujuan untuk mendapatkan kebutuhan pangan pokok yang berkualitas dengan harga terjangkau, untuk memenuhi konsumsi sehari-hari sekaligus mengendalikan inflansi nasional.

Pengendalian harga pangan melalui GPM merupakan langkah yang penting terutama untuk bahan pokok yang mengalami tren kenaikan harga, sehingga langkah intervensi pemerintah sangat berdampak positif. **(ton)**

Title	Hutan Register 45 Mesuji Gundul Berdampak pada Perubahan Iklim	 Kementerian Pertanian
Date	6 Juli 2023	
Media	Lampung Post	
Page	14	
Author	Nas/L1	



■ ANTARA/ADENG BUSTOMI

**KETAHANAN PANGAN** Petani menjemur gabah yang sudah dipanen di Desa Damaraja, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, Selasa (20/6). Kementerian Pertanian menggandeng Kemendagri, Kementerian PU-Pera, Kementerian ATR/BPN, serta Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia untuk menjaga dan meningkatkan ketahanan pangan di tengah ancaman kekeringan dan El Nino atau perubahan iklim.

## Hutan Register 45 Mesuji Gundul Berdampak pada Perubahan Iklim

GUNDULNYA kawasan hutan Register 45 seluas 43.100 hektar berdampak besar terhadap perubahan iklim, khususnya di Mesuji. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mesuji, Agung Subandara, mengatakan jika gundulnya hutan di Register 45 jelas akan menimbulkan perubahan iklim ke arah yang lebih buruk.

"Dampak nyatanya ada di kegiatan BPBD, pada saat banjir dan kekeringan di desa-desa tetangga kawasan Register 45," kata Agung.

Saat ini, Mesuji sosialisasikan Program Kampung Iklim (Proklim), dengan Proklim tersebut diharapkan semua *stakeholders* dapat bersama-sama menemukan dan memperjuangkan solusi untuk berbagai permasalahan iklim.


"Ada resolusi plastik, yakni langkah besar dalam upaya dunia memerangi polusi plastik, mengingat makin mengkhawatirkannya permasalahan plastik yang ikut berperan dalam tiga jenis krisis yang melanda planet kita, yaitu perubahan iklim, kehilangan biodiversitas, serta polusi. Salah satu upaya pemerintah untuk mengatasi krisis tersebut yaitu melalui Program Kampung Iklim," kata Agung.

Proklim ditetapkan sebagai ge-

rakan Nasional Pengendalian Perubahan Iklim berbasis Masyarakat yang merupakan salah satu langkah strategis pemerintah dalam membicarakan isu global perubahan iklim menjadi aksi bersama di tingkat lokal yang merupakan implementasi dari Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 84/MenLHK/Setjen/Kum.1/11/2016 tentang Program Kampung Iklim.

Masyarakat Desa Talang BATU, Kecamatan Mesuji Timur, mengaku wilayahnya kerap banjir dan bersuhu tinggi sejak Register 45 yang mengeliminasi hutan gundul total. "Sebelum hutan gundul, banjir biasanya lima tahun sekali, sekarang hujan 2 hari saja langsung banjir, air sudah tidak bisa dikonsumsi lagi, untuk mandi pun tidak layak. Cuaca terasa lebih panas, jauh berbeda saat Register 45 masih penuh pohon," ujar Kepala Desa Talangbatu, Sulham Efendi.

Lukman (38), warga Desa Berasnamakmur, mengatakan jika sumurnya saat ini kerap mengalami kekeringan sejak Register 45 gundul. "Register ada di seberang jalan, dan semenjak gundul sumur kerap kering, padahal dulu tidak," ujarnya. (NAS/L1)

Title	Inflasi Provinsi Banten Terkendali di 3,15 Persen	 Kementerian Pertanian
Date	6 Juli 2023	
Media	Tangerang Raya	
Page	8 Part 1	
Author	Hed/ris	

# Inflasi Provinsi Banten Terkendali di 3,15 Persen



Kantor BPS Provinsi Banten.

ISTIMEWA

## ■ BULAN JUNI 2023

### SERANG | TRM

Berdasarkan Berita Resmi Statistik Provinsi Banten Juni 2023, data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten menunjukkan terdapat beberapa sektor yang mengalami peningkatan dibandingkan pada bulan Mei 2023. Inflasi Provinsi Banten terkendali di angka 3,15 persen, Nilai Tukar Petani (NTP) naik 0,85 persen, serta industri pariwisata naik 45,69 persen.

Statistisi Ahli Madya Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten Bambang

Widjanarko mengungkapkan Inflasi Provinsi Banten secara Y-o-Y pada Juni 2023



berada pada 3,15 persen atau dibawah angka Inflasi Nasional yang mencapai 4,33 persen.

"Hal tersebut bisa kita lihat secara M-t-M yang menyumbangkan sebesar 0,15 persen dan beberapa komoditas yang terus kita kendalikan. Dimana Provinsi Banten cukup terkendali untuk situasi di bulan Juni ini," jelas Bambang saat menyampaikan Berita Resmi Statistik (BRS) Provinsi Banten Juni 2023 secara virtual, baru-baru ini.

Diutarakan, ada beberapa komoditas yang memberikan andil terbesar pada Inflasi di bulan Juni 2023 menurut beberapa kelom-

pok pengeluaran secara Y-o-Y. Salah satu andil inflasi di antaranya menurut komoditas barang dan jasa yang dikonsumsi rumah tangga pada urutan pertama ditempati oleh bensin sebesar 1,13 persen.

"Namun demikian, bensin mengalami deflasi sebesar 0,07 persen dan diikuti oleh cabai merah," jelasnya.


Tidak hanya itu, Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten juga merilis Nilai Tukar Petani (NTP) di Provinsi Banten pada Juni 2023 yakni sebesar 103,55 atau mengalami kenaikan sebesar 0,85% persen dibandingkan Mei 2023. Kenaikan tersebut dikarenakan ke-

naikan Indeks Harga Terima Petani (It) 0,97 persen menjadi 123,23 serta naiknya Indeks Harga Bayar Petani (Ib) 0,12 persen menjadi 119,01

"Adapun komoditas yang menjadi pemicu bagi indeks yang diterima petani itu gabah, pisang, dan daging ayam ras. Sedangkan untuk indeks harga bayar petani dipicu oleh komoditas ketimun, cabai rawit dan daging ayam ras," jelas Statistisi Ahli Madya Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten Bambang Widjanarko

Selain itu, dirinya juga menyampaikan bahwa NTP

» Baca **INFLASI** ...Hal. 7

Title	Inflasi Provinsi Banten Terkendali di 3,15 Persen	 Kementerian Pertanian
Date	6 Juli 2023	
Media	Tangerang Raya	
Page	8 Part 2	
Author	Hed/ris	

## INFLASI

Provinsi Banten berada di antara Provinsi-Provinsi lain di Pulau Jawa yang pada bulan ini masih relatif rendah. Namun demikian, nilai persentase NTP Provinsi Banten terus naik setiap bulannya.

“Dibandingkan bulan lalu meskipun kita masih berada di posisi ke 5 Provinsi di Jawa kita terus melakukan perubahan sedikit demi sedikit pada nilai NTP yang menyumbangkan 0,85% dibandingkan bulan Mei,” jelasnya.

Selain itu, Bambang juga menyampaikan Nilai Tukar Usaha Petani (NTUP) di Provinsi Banten pada bulan Juni 2023 sebesar 105,84 atau naik 0,87 persen dibandingkan bulan Mei 2023. Lantaran Indeks Harga Terima

Petani (It) sebesar 123,23 dan Indeks Biaya Produksi dan Penambahan Barang Modal (BP-PBM) sebesar 116,52.

“Begitu pula dengan Nilai Tukar Usaha Petani (NUTP) di bulan Juni 2023 mengalami kenaikan. Dimana harga terima petani dipicu oleh komoditas gabah, daging ayam ras dan pisang dan BPPBM dipicu oleh komoditas sewa traktor tangan dan bakalan kerbau (berusia > 12 Bulan),” jelas Bambang.

Ia juga menyampaikan bahwa harga gabah kering panen serta giling di Provinsi Banten mengalami kenaikan pada Juni 2023, dibandingkan bulan sebelumnya, baik di tingkat petani maupun di tingkat penggilingan.

“Untuk gabah kering panen (GKP) di tingkat petani harga rata-ratanya Rp 5.177 per kilogram atau naik 5,26 persen. Sedangkan gabah kering di tingkat penggilingan harga rata-rata sebesar Rp 5.320 atau naik sebesar 5,49 persen,” jelasnya.

Kemudian untuk gabah kering giling (GKG) di tingkat petani harga rata-rata sebesar 5.660 per kilogram atau naik sebesar 3,61 persen dan di tingkat penggilingan harga rata-rata sebesar 5.686 per kilogram atau naik sebesar 3,75 persen.

Sementara itu, perkembangan pariwisata Provinsi Banten tingkat penghunian kamar gabungan pada bulan Mei 2023 mengalami kenaikan sebesar


45,69 persen. Terdapat kenaikan sebesar 7,55 poin dibandingkan pada bulan April 2023.

“Sementara itu jika dibandingkan bulan yang sama di tahun 2022, TPK Banten mengalami Penurunan. Tapi itu sebelum PPKM dicabut,” ungkapnya.

Tidak hanya itu kenaikan sektor pariwisata juga bisa dilihat dari rata-rata lama tamu menginap. Dijelaskan pada bulan Mei 2023 RLTM mencapai 1,75 hari atau bertambah sebesar 0,15 poin dibandingkan April 2023.

“Dan hal tersebut artinya ada keseimbangan dari penghunian kamar dan lama menginap yang sama-sama meningkat pada sektor pariwisata ini,” ungkapnya. (hed/ris)

Sambungan Hal. 8

Title	Kadisnakeswan Dompu Berharap Ada Solusi bagi Ternak yang Tidak Laku	 Kementerian Pertanian
Date	6 Juli 2023	
Media	Suara Ntb	
Page	12	
Author	Ula	

# Kadisnakeswan Dompu Berharap Ada Solusi bagi Ternak yang Tidak Laku

## Dompu (Suara NTB) -


Plt Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Dompu, Ir. Abduh mengakui ada ternak asal Kabupaten Dompu diantara ribuan ternak asal NTB yang tidak laku untuk kebutuhan hewan qurban di Jabodetabek. Ternak - ternak ini hendak dipulangkan kembali untuk dilakukan penggemukan kembali.

“Memang ada. Tapi kita belum tahu berapa jumlahnya, karena kita belum diinformasikan,” kata Ir. Abduh kepada Suara NTB saat dihubungi, Senin (3/7).

Dikatakan Abduh, dari ribuan ternak yang belum laku tersebut kebanyakan dari Bima. Oleh para pengusaha hendak dipulangkan kembali dan akan dilakukan penggemukan. Tapi Gubernur NTB, Dr H Zulkieflimansyah tengah mengupayakan solusi bersama Kementrian Pertanian RI agar para pengusaha ini tidak banyak merugi. “Kita berharap ada solusi, sehingga pengusaha ini tidak banyak merugi,” katanya.

Diakui Abduh, jumlah ternak yang dikirim ke pasar Jabodetabek jauh di atas kebutuhan yang diharapkan. Kuota untuk kebutuhan pasar hewan qurban Kabodetabek hanya 20 ribu ekor, tapi pengiriman ternak dari NTB jauh di atas itu. “Kelebihan dari kuota yang ada,” akunya.


Sementara Bambang, salah seorang pengusaha ternak asal Dompu mengaku, bukan hanya ternak asal NTB yang memenuhi kebutuhan hewan qurban di Jabodetabek. Tapi ada juga dari Jawa Timur, Jawa Tengah dan NTT. “Tapi memang didominasi oleh ternak asal NTB,” kata Bambang. (ula)

Title	Kinerja Penjualan Eceran Tumbuh Positif	 Kementerian Pertanian
Date	6 Juli 2023	
Media	Lampung Post	
Page	2	
Author	Antara Foto/Fikri Yusuf	



■ ANTARA FOTO/FIKRI YUSUF

**DIGITALISASI PENEBUSAN PUPUK BERSUBSIDI.** Pegawai memotret petani yang membeli pupuk bersubsidi menggunakan aplikasi i-Pubers atau Integrasi Pupuk Bersubsidi di Koperasi Krama Subak Lumbung Sari Temesi, Gianyar, Bali, Senin (3/7). Digitalisasi penebusan pupuk bersubsidi menggunakan aplikasi hasil kerja sama PT Pupuk Indonesia dengan Kementerian Pertanian tersebut untuk memudahkan pencatatan transaksi, meningkatkan transparansi, serta menyederhanakan proses penebusan pupuk bersubsidi di tingkat kios.

Title	KPK Periksa 49 Pejabat dan ASN Kementan	 Kementerian Pertanian
Date	6 Juli 2023	
Media	Harian Jogja	
Page	2	
Author	Ant	

## KPK Periksa 49 Pejabat dan ASN Kementan


JAKARTA—Sebanyak 49 pejabat dan aparatur sipil negara (ASN) di Kementerian Pertanian (Kementan) telah dimintai keterangan terkait dengan penyelidikan dugaan korupsi di instansi tersebut.

"Untuk kebutuhan penyelidikan sudah mengundang, ya, untuk permintaan keterangan itu 49 [orang], baik itu pejabat, ASN di lingkungan Kementan, termasuk Pak Menteri [Syahrul Yasin Limpo]," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri, saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu (5/7).

Ali menambahkan saat ini lembaga antirasuah sedang menganalisis keterangan para pihak tersebut dan mengumpulkan berbagai alat bukti lainnya.

Apabila berdasarkan analisis ditemukan peristiwa pidana dan ditemukan orang yang bisa dipertanggungjawabkan secara hukum, maka hal tersebut akan ditindaklanjuti dengan meningkatkan proses penyelidikan ke tahap penyidikan. KPK juga tak menutup kemungkinan kembali memanggil 49 orang tersebut apabila diperlukan demi proses penyelidikan yang sedang berjalan.

"Kalau memang dibutuhkan kembali, ya, siapa pun dari 49 itu pasti akan kami undang kembali dalam konteks penyelidikan," jelasnya. *(ant)*

Title	Lampung Antisipasi Perubahan Iklim Ekstrem	 Kementerian Pertanian
Date	6 Juli 2023	
Media	Lampung Post	
Page	14	
Author	Ant/L1	



■ ANTARA/HAFIDZ MUBARAK  
**BAHAS PERUBAHAN IKLIM** Presiden Joko Widodo bersama Ibu Negara Iriana Joko Widodo, didampingi Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan, memberikan keterangan pers sebelum bertolak ke Jepang di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, beberapa waktu lalu. Presiden berkunjung ke Hiroshima, Jepang, untuk menghadiri undangan PM Jepang Fumio Kishida pada pertemuan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G7 yang di antaranya akan membahas perubahan iklim, pangan, dan energi.

# Lampung Antisipasi Perubahan Iklim Ekstrem

*Bentuk tim gugus tugas El Nino yang terintegrasi antara pusat, provinsi, serta kabupaten/kota agar pelaksanaan program adaptasi dan antisipasi berjalan terstruktur.*

**SILVIA AGUSTINA**  
silvia@lampungpost.co.id

**G**UBERNUR Lampung Arinal Djunaidi mengikuti Rapat Koordinasi Langkah Strategis Adaptasi dan Antisipasi Perubahan Iklim Ekstrem (El Nino) yang dipimpin langsung oleh Menteri Pertanian RI Syahrul Yasin Limpo secara virtual di Ruang Command Center lantai II, Kantor Diskominfotik Lampung, beberapa waktu lalu. Mentan menyampaikan pembangunan pertanian dihadapkan pada tantangan yang makin berat, yaitu adanya perubahan iklim dan iklim ekstrem kekeringan (El Nino).

Berdasarkan prediksi global International Research Institute (IRI) for Climate and Society dan juga BMKG, saat ini terjadi penguatan intensitas El Nino dengan perkiraan puncak pada Agustus 2023. Hal itu berdampak menurunnya produksi

dan ketersediaan pangan 20%—30%. Menanggapi arahan Menteri Pertanian, Arinal melaporkan bahwa berdasarkan hasil analisis data kekeringan tanaman padi di Lampung pada 2023 relatif cukup aman. Dalam mengantisipasi perubahan iklim ekstrem El Nino, Gubernur Lampung melaporkan bahwa pemerintah daerah akan menyediakan fasilitas penunjang di kabupaten-kabupaten yang masih belum memiliki fasilitas yang memadai.

"Kami akan mempersiapkan sumur bor di kabupaten dengan status cukup rawan karena kabupaten yang masuk status tersebut adalah kabupaten yang masih belum memiliki irigasi teknis. Kami juga siap menindaklanjuti apabila terdapat peluang dan cara baru dalam menghadapi kondisi tersebut," ujar Arinal.

Dia meminta kepada pemerintah daerah dapat berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian dan Kementan

terian PU dikarekankan stok air pada embung-embung yang telah dibangun sudah mulai menipis. Arinal menyampaikan kesiapannya terkait arahan Menteri Pertanian pada pengembangan komoditas di lahan 1.000 hektare.

"Pengembangan 1.000 hektare akan kami siapkan seperti yang disampaikan oleh Bapak Menteri.

**"Lampung mendukung kebijakan ini melalui diterbitkannya instruksi dan peraturan Gubernur tentang Proklam."**

Mudah-mudahan dapat dilakukan pada dua kabupaten, tetapi satu harapan, di Pringsewu dan Pesawaran, khususnya di Gadingrejo dan Gedongtataan. Itu memang sentral sawah. Semoga ini dapat berjalan dengan baik," kata dia.

Terakhir, Gubernur melaporkan

bahwa Pemerintah Provinsi Lampung siap untuk membentuk tim gugus tugas El Nino. "Kami siap membentuk tim gugus tugas dalam menghadapi El Nino, terutama di wilayah-wilayah yang rawan ataupun cukup rawan di kabupaten/kota yang ada di Lampung," ujarnya.

Pemerintah Provinsi Lampung berupaya meningkatkan jumlah program kampung iklim (proklam) di 15 kabupaten dan kota guna mengurangi dampak perubahan iklim serta mengantisipasi potensi bencana. "Pemerintah Pusat bersama pemerintah daerah telah mencanangkan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, yang menyebabkan perubahan iklim dengan berbagai upaya," ujar Kepala Dinas Lingkungan Hidup Lampung, Emilia Kusumawati, di Bandar Lampung, beberapa waktu lalu.


Dia menjelaskan di Lampung saat ini ada 2.654 desa dan diharapkan 25 persennya bisa menjadi kampung iklim untuk mencegah bencana alam. "Lampung mendukung kebijakan ini melalui diterbitkannya instruksi dan peraturan Gubernur tentang Proklam. Kami mengimbau kepada kabupaten/kota kalau bisa ada 25 persen saja dari

total desa ada kampung iklimnya. Sebab, ini bisa sangat membantu daerah pesisir dari terjadinya potensi bencana-bencana akibat efek gas rumah kaca," ujarnya.

Menurut Emilia, ditargetkan di daerahnya ada 664 kampung iklim yang dapat terbentuk. Sejalan dengan target rencana pembangunan jangka menengah daerah untuk pengurangan emisi gas rumah kaca 7 persen.

"Kalau di Lampung ini baru ada 26 kampung iklim yang tersebar di delapan kabupaten dan kota, dan kebanyakan ada di Tanggamus. Harapannya semua bisa mengembangkan proklam ini," ujar dia.

Emilia melanjutkan kampung iklim tersebut nantinya menjadi model kampung yang melakukan pengelolaan limbah, sampah rumah tangga, dan pemilahan secara mandiri. "Pengelolaan limbah rumah tangga ini saat ini juga menjadi penilaian Adipura, ditambah lagi harus memiliki lima kampung iklim sebagai komponen penilaian. Jadi, akan terus didorong agar banyak kampung iklim di Lampung untuk mengurangi dampak perubahan iklim dan bencana alam," ujarnya. (ANT/L1)

Title	Masyarakat Bali Diajak Aktif Kendalikan Rabies	 Kementerian Pertanian
Date	6 Juli 2023	
Media	Pos Kota	
Page	10	
Author	Rizal/din	

## Masyarakat Bali Diajak Aktif Kendalikan Rabies

JAKARTA (Poskota) - Wakil Menteri Pertanian (Wamentan), Harvick Hasnul Qolbi mengajak masyarakat Bali untuk berperan aktif mengendalikan penularan rabies di Indonesia.

Dikatakan, masyarakat punya peran besar dalam mengumpulkan informasi yang dapat dilaporkan secara langsung kepada petugas terdekat terkait adanya tanda-tanda gejala pada setiap hewan peliharaan.

"Masyarakat harus segera melaporkan gejala-gejala yang ada secara cepat. Kita ingin Bali menjadi daerah percontohan dalam menekan rabies secara cepat. Jadi partisipasi masyarakat sangat kita harapkan sekali," ujar Wa-

men di Tabanan, Provinsi Bali, Rabu (5/7/2023).

Selain itu, wamentan meminta jajaran Kementan dan pemerintah daerah untuk segera mendistribusikan vaksin rabies secara masif di seluruh Indonesia. Sebab, jangan sampai penyebaran rabies tidak bisa dikendalikan secara baik.

"Saya meminta kepada jajaran Kementan dan pemerintah daerah untuk segera mengakselerasi baik itu distribusi maupun sosialisasi vaksin. Jangan sampai ini menjadi masalah baru karena rabies tidak bisa kita selesaikan," katanya.

Wamen berharap penanganan rabies melalui penyuntikan vaksin bisa menekan Bali menjadi dae-



Wamentan Harvick Hasnul Qolbi.

rah bebas penyakit. Ia menargetkan Indonesia mampu keluar sebagai negara sehat dan mampu mengend-

alikan penyakit hewan secara cepat dan tepat.

"Karena itu sekali lagi kolaborasi semua pihak sangat

diharapkan untuk menekan penularan rabies secara merata. Selain itu dukungan dan partisipasi dari masyarakat


sangat penting agar saling berkomunikasi dengan satu lainnya," ucapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Tabanan, I Made Subagia mengatakan, bahwa pengendalian rabies terus dilakukan secara masif. Bahkan sampai saat ini dia menilai vaksinasi rabies sudah sangat maksimal dengan menasar semua kecamatan.

"Kabupaten Tabanan terdiri dari 10 kecamatan dan 133 desa. Sampai saat ini telah dilaksanakan vaksinasi di 102 desa dengan estimasi populasi sebanyak 62.104 ekor dan jumlah ter vaksin sebanyak 34.093 dengan cakupan sebesar 54,90 persen," ujar dia.

Disebutkan, kasus positif rabies di tahun 2022 mencapai 32 kasus dan tahun 2023 sampai bulan Juni sudah terjadi 13 kasus. Pihaknya juga melakukan imbauan kepada masyarakat yaitu sosialisasi rabies dan eliminasi selektif terhadap hewan penular rabies yang kontak erat dengan positif rabies.

"Kami masih memiliki stok vaksin rabies sebanyak 2.303 dosis kemudian kalung 35.002 kartu vaksinasi 55 ribu lembar. Dapat kami sampaikan sekiranya kami bisa memenuhi kekurangan vaksin agar pelan tapi pasti bisa menasar sekitar 15.590 dosis sehingga cakupan vaksinasi sebesar 80% sudah dapat kita capai," kata dia. (Rizal/Din)

Title	Mentan Instruksikan Pemda Siapkan Lumbung Pangan	 Kementerian Pertanian
Date	6 Juli 2023	
Media	Radar Banyumas	
Page	2	
Author	Lat/jpc	

# Mentan Instruksikan Pemda Siapkan Lumbung Pangan

## Antisipasi Dampak El Nino

**JAKARTA** - Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo memberikan instruksi kepada pemerintah daerah untuk menyiapkan lumbung pangan di daerah masing-masing. Itu dimaksudkan untuk mengantisipasi dampak El Nino.

"Lumbung dibutuhkan bagi kita dalam menghadapi El Nino. Setiap daerah harus memiliki stok yang banyak. Bila buffer stock tidak kuat, El Nino bisa sangat berbahaya," kata Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo saat memberikan arahan di forum diskusi Meskipun El Nino, Bisa Panen, secara

daring di Jakarta.

Pada Rabu (5/7) kemarin, Menteri Pertanian meminta pemerintah daerah sungguh-sungguh dalam menghadapi El Nino. Dapat berdampak sangat bahaya bagi pasokan pangan masyarakat apabila tidak dihadapi dengan sungguh-sungguh.

Selain itu, Mentan Syahrul meminta setiap daerah menyiapkan lahan percontohan untuk menghadapi El Nino. Lahan percontohan seluas 1.000 hektare di setiap daerah dibutuhkan untuk menjadi penggerak peningkatan produksi daerah tersebut.

"Biar petani dan warga bisa melihatnya sebagai contoh, seperti pengelolaan air atau pemanfaatan pupuk organik. Dengan lahan tersebut,

masyarakat bisa meningkatkan hasil produksi sebagai komoditas pangan," imbuh Syahrul.


Syahrul juga mengingatkan pemda untuk mengidentifikasi dan memetakan lokasi terdampak kekeringan serta mengelompokkan daerah merah, kuning, dan hijau. Selanjutnya mempercepat masa tanam untuk mengejar sisa hujan.

Mentan juga mengingatkan pemda untuk selalu meningkatkan ketersediaan alsintan untuk mempercepat masa tanam, menyediakan benih yang lebih tahan kekeringan dan organisme pengganggu tumbuhan, serta pengembangan pusat pupuk organik dan mandiri di setiap daerah. (\* /lat/jpc)



PANEN : Petani memanen padi di Kebonsari, Borobudur, Kabupaten Magelang.

JAWAPOS.COM

Title	Pabrik Porang di Lobar Resmi Beroperasi Akhir Juli Mendatang	 Kementerian Pertanian
Date	6 Juli 2023	
Media	Suara Ntb	
Page	11	
Author	Suara Ntb	

# Pabrik Porang di Lobar Resmi Beroperasi Akhir Juli Mendatang

Mataram (Suara NTB) -

Setelah resmi dibangun 25 Mei 2022 lalu, Pabrik Porang Lombok Barat (Lobar) segera diresmikan sekaligus promosi produk pertama hasil olahan tanaman porang. Dijadwalkan peresmian akan dilakukan pada akhir Juli 2023 ini.

Bertempat di ruang kerjanya, Gubernur NTB Dr H. Zulkieflimansyah, mengapresiasi dan akan menghadiri acara peresmian Pabrik Porang Lobar tersebut. Bahkan Bang Zul sapaan akrab Gubernur NTB ini memberi saran kepada GM Porang Lobar untuk bersilaturahmi ke Universitas Mataram.

"Kami sangat apresiasi dan kami tunggu inovasi-inovasi dari Pabrik Porang" jelas Bang Zul.

GM Pabrik Porang Lobar, Iban Pribadi menjelaskan, pengoperasian Pabrik Porang ini direncanakan pada tanggal 26 Juli 2023 mendatang. Pihaknya juga akan mempromosikan produk pertama hasil olahan dari tanaman po-

rang tersebut.

"Alhamdulillah sudah ketemu Pak Gubernur kami sampaikan terkait pengoperasian Pabrik Porang sekaligus promosi produk pertama. Kami juga meminta waktu luang Pak Gubernur agar kami bisa presentasi secara utuh tentang program-program dan rencana kami ke depan selain dari pengoperasian pabrik," ujarnya.

"Ketika Pabrik Porang sudah mulai beroperasi mereka meminta bantuan kepada kami yang di provinsi untuk menjembatani dengan usaha-usaha industri kecil menengah, UKM, yang ada di NTB untuk berkolaborasi," kata Kabid Kerja Sama Penga-




**GM Pabrik Porang Lobar, Iban Pribadi bersilaturahmi dengan Gubernur NTB, H.Zulkieflimansyah, kemarin.**

wasan Promisi dan Investasi Industri Dinas Perindustrian NTB, Arifin pada kesempatan yang sama.

Ditambahkan Arifin, yang akan hadir dalam peresmian

Pabrik Porang tersebut nantinya Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Menteri Perdagangan Menteri Pertanian dan sejumlah Kepala OPD lingkup Pemprov NTB. (r)

Title	Pemprov DKI terus Tingkatkan Vaksinasi Rabies	 Kementerian Pertanian
Date	6 Juli 2023	
Media	Jakarta Raya	
Page	3	
Author	Jr	

## Pemprov DKI terus Tingkatkan Vaksinasi Rabies

JAKARTA RAYA—Untuk mempertahankan status Provinsi DKI Jakarta sebagai daerah bebas rabies, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus meningkatkan pelayanan vaksinasi rabies gratis dan sterilisasi Hewan Penularan Rabies (HPR).

"Vaksinasi rabies dengan sasaran anjing, kucing, kera, dan musang secara berkelanjutan dan pengendalian populasi melalui sterilisasi HPR," kata Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kelautan dan Pertanian (KPKP) DKI Jakarta Suharini Eliawati saat dihubungi di Jakarta, kemarin.

Berdasarkan data Dinas KPKP DKI, total cakupan vaksinasi rabies di wilayah DKI Jakarta dan Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan



Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memperkuat pelayanan vaksinasi rabies gratis dan realisasi sterilisasi Hewan Penularan Rabies (HPR).

Peternakan (Pusyankeswannak) Dinas KPKP DKI, sejak Januari hingga Juni 2023 sebanyak 20.423 ekor.

"Vaksinasi anjing sebanyak 6.408 ekor, kucing 13.802 ekor, kera 129 ekor, dan musang

84 ekor," ujar Suharini.

Sedangkan, realisasi sterilisasi HPR hasil kerja sama Dinas KPKP DKI dengan Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PDHI) cabang DKI Jakarta, dokter hewan prak-

tisi, klinik hewan, dan komunitas penyayang hewan pada kucing sebanyak 2.680 ekor.

Lalu, sterilisasi HPR oleh Pusyankeswannak Dinas KPKP DKI pada kucing sebanyak 852 ekor.


Melalui akun Instagram @dkpkp.jakarta, Dinas KPKP DKI Jakarta menjelaskan bahwa rabies merupakan salah satu penyakit hewan menular (zoonosis) utama dan selalu menjadi masalah kesehatan masyarakat.

Sejak tahun 2004, status DKI Jakarta merupakan daerah bebas rabies yang ditetapkan oleh Keputusan Menteri Pertanian Nomor 566/Kpts/PD.640/10/2004 tentang Pernyataan Provinsi DKI Jakarta, Banten dan Jawa Barat Bebas Rabies.

Walau demikian, Provinsi DKI Jakarta tetap merupakan daerah risiko tinggi terhadap penularan rabies, karena berbatasan dengan daerah yang belum bebas rabies dan lalu lintas Hewan Penular Rabies (HPR) yang tinggi ke wilayah DKI Jakarta.

Sebelumnya, Dinas Kesehatan DKI Jakarta menyebut pada Juni terdapat akumulasi 1.733 kasus Gigitan HPR di DKI Jakarta, yang naik 206 kasus dari total 1.527 kasus pada Mei 2023.

Laporan tersebut berasal dari total lima rumah sakit yaitu dua rumah sakit rujukan di DKI Jakarta, 2 RSUD, dan 1 rumah sakit swasta di Jakarta. Kasus gigitan tersebut berasal dari kucing, anjing, monyet, kera dan keelawar. (jr)


Title	PERKUAT KETAHANAN PANGAN	
Date	6 Juli 2023	
Media	Lampung Post	
Page	16	
Author	Antara Foto/Adeng Bustomi	

#### PERKUAT KETAHANAN PANGAN

Foto udara lahan pertanian di Desa Darmaraja, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, Selasa (20/6). Kementerian Pertanian menggandeng Kemendagri, Kementerian PUPR, dan Kementerian ATR/BPN serta Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) untuk menjaga dan meningkatkan ketahanan pangan di tengah ancaman kekeringan dan El Nino atau perubahan iklim.

■ ANTARA FOTO/ADENG BUSTOMI



Title	Siaga Lumbung Pangan Hadapi El Nino	 Kementerian Pertanian
Date	6 Juli 2023	
Media	Lampung Post	
Page	16	
Author	MI/DI	

## Siaga Lumbung Pangan Hadapi El Nino

TIAP daerah hingga tingkat desa mesti siap menghadapi dampak El Nino. Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo mendorong pemerintah daerah segera menyiapkan lumbung pangan.

Menurut Mentan, dampak El Nino bisa sangat berbahaya jika tidak diantisipasi secara tepat dan cepat. "Lumbung dibutuhkan bagi kita dalam menghadapi El Nino. Setiap daerah harus memiliki stok yang banyak. Bila *buffer stock* tidak kuat, El Nino bisa sangat berbahaya," ujar Mentan dalam kegiatan Forum Diskusi Meskipun El Nino, Bisa Panen di Kantor Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan, Bogor, Selasa (4/7).

Mentan meminta pemerintah daerah serius menghadapi El Nino. Apalagi cuaca ekstrem ini bisa sangat berdampak terhadap pasokan pangan masyarakat.


"Tugas utama pemerintah adalah menyediakan pangan untuk dikonsumsi masyarakat. Kalau kondisi pangan tidak baik, sama saja usaha kita menjadi nol. Buat apa kita punya jalan dan segala fasilitas bagus, tapi tidak ada makanan untuk rakyat," ujar Mentan.

Selain mempersiapkan lumbung pangan, Mentan juga meminta setiap daerah untuk menyiapkan lahan percontohan seluas 1.000 hektare. Lahan percontohan ini akan menjadi lokomotif bagi peningkatan kapasitas produksi daerah tersebut.

"Biar petani dan warga bisa melihatnya sebagai contoh, seperti pengelolaan air atau pemanfaatan pupuk organik. Dengan lahan tersebut, masyarakat bisa meningkatkan hasil produksi berbagai komoditas pangan," ujarnya.

Di sisi lain, Mentan juga mengapresiasi terselenggaranya forum diskusi yang diinisiasi atas kerja sama Kementerian Pertanian (Kementan) dan Perhimpunan Meteorologi Pertanian Indonesia (Perhimpi). Ia mengharapkan dari forum diskusi ini bisa tersusun program dan langkah aksi yang bisa digunakan dalam mengantisipasi El Nino.

"Kerja sama sangat penting untuk menentukan arah yang akan kita lakukan hari ini dan besok. Jajaran Kementan dan Perhimpi hadir, begitu juga kepala dinas dari berbagai daerah. Kita duduk bersama untuk mencari solusi terbaik," ujarnya. (MI/DI)

Title	Antisipasi Dampa El Nino, Pemerintah Antisipasi dengan Pengadaan Air Bersih	
Date	6 Juli 2023	
Media	Neraca	
Page	6	
Author	Bari/ant	

## Antisipasi Dampak El Nino, Pemerintah Antisipasi dengan Pengadaan Air Bersih

### NERACA


Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan bahwa pemerintah akan mengantisipasi potensi kekeringan akibat fenomena El Nino lewat pengadaan air bersih bagi masyarakat. "Kekeringan akan kita support dari sisi pengadaan air terutama yang paling dibutuhkan oleh masyarakat bawah yakni air bersih dan air minum," ujar Muhadjir di Gedung Kemenko PMK, Jakarta, Rabu (5/7).


El Nino merupakan fenomena pemanasan suhu muka laut di atas kondisi normalnya yang terjadi di Samudra Pasifik bagian tengah. Fenomena tersebut meningkatkan potensi pertumbuhan awan di Samudra Pasifik tengah dan mengurangi curah hujan di wilayah Indonesia.

Penurunan curah hujan dapat menimbulkan kekurangan pasokan air untuk pertanian dan kegiatan usaha yang lain maupun untuk keperluan sehari-hari warga, termasuk potensi kebakaran hutan dan lahan.

Muhadjir mengatakan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah memiliki pemetaan wilayah yang berpotensi terjadi kekeringan dan kebakaran hutan. Wilayah-wilayah tersebut akan diintervensi guna meminimalisir terjadinya hal yang tidak diinginkan. "Sudah ada petanya, nanti BNPB yang akan bertanggung jawab," kata dia.

Sementara untuk mengatasi gagal panen akibat kekeringan, Pemerintah akan mengupayakan bantuan bagi petani yang terdampak. Pemberian bantuan ini persis seperti saat Presiden Joko Widodo memberikan bantuan bagi pertanian yang puso akibat banjir.

"Ini, kan, Pak Presiden sudah menyetujui bantuan puso banjir. Jadi untuk petani yang gagal panen akibat banjir, Bapak Presiden sudah menyetujui untuk diberi bantuan. Kekeringan juga kemungkinan (diberi bantuan) tapi saya belum mendapat arahan untuk itu," katanya.  bari/ant

Title	Jabar Koordinasi dengan Bapanas Terkait Harga Daging Ayam	
Date	6 Juli 2023	
Media	Neraca	
Page	9	
Author	Ant	

## Jabar Koordinasi dengan Bapanas Terkait Harga Daging Ayam

### NERACA

Bandung - Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) telah berkoordinasi dengan Badan Pangan Nasional (Bapanas) terkait upaya menyasiasi kenaikan harga daging ayam di wilayah Jawa Barat, yang saat ini harganya mencapai Rp40-45 ribu per kilogram.

"Koordinasi di Pemprov dengan Bapanas itu yang dilakukan terus-menerus, karena masyarakat Jawa Barat terbanyak konsumsi ayam. Koordinasi dengan di pusat untuk intervensi supaya menjaga harga tidak terus meningkat," kata Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Jawa Barat Noneng Komara Nengsih, di Gedung Sate, Kota Bandung, Rabu (5/7).

Noneng menuturkan bahwa setelah Idul Fitri 2023, harga ayam potong di wilayah Jawa Barat tidak kunjung turun, bahkan pernah mencapai Rp45 ribu per kilogram dan kenaikan pun dialami secara merata di 27 kota/kabupaten di Jawa Barat.


Menurut dia, adanya fenomena El Nino menyebabkan produktivitas pipilan jagung (yang menjadi pakan ayam) di negara pengekspor mengalami penurunan. Sehingga menyebabkan adanya kenaikan harga, mengingat pipilan jagung menjadi pakan utama ayam di Indonesia khususnya Jawa Barat.

"Jadi masalah utama di kenaikan pakan dari jagung. Sampai saat ini masih banyak impor. Pengekspor jagung salah satu terbesar ke kita, India dan sebagainya kena El Nino, bencana. Kemudian berkurang suplai pipilan jagung," kata dia.

Disperindag Jawa Barat, lanjut Noneng, juga melakukan pemantauan ke pasar-pasar secara berkala dalam memantau perkembangan harga komoditas di Jawa Barat, dengan harapan nilai jual dapat terkontrol.

"Pemantauan ke pasar terus kita lakukan. Intervensi suplai di teman-teman hulu, DKPP, Pertanian. Kami lebih memantau, koordinasi dengan kementerian. Terutama terkait ekspor, impor supaya tidak tersendat," kata dia.

"Untuk subsidi, tahun ini sudah selesai ketika menjelang Idul Fitri kemarin. Total anggaran Rp10 miliar dikururkan. Tahun depan baru ada lagi anggarannya," lanjut Noneng. ● ant

Title	Kementan Ajak Sodagar Indonesia Percepatan dan Tingkatkan Produksi	 Kementerian Pertanian
Date	6 Juli 2023	
Media	Neraca	
Page	10	
Author	Gro	

## JAGA KETAHANAN PANGAN

# Kementan Ajak Sodagar Indonesia Percepatan dan Tingkatkan Produksi

### NERACA

Makassar - Kementerian Pertanian (Kementan) mengajak para sodagar Indonesia untuk mendukung percepatan dan peningkatan produksi pertanian Indonesia. Menurut SYL, peran sodagar atau pedagang besar sangat penting dalam menyerap hasil produksi petani terutama disaat cuaca ekstrem el nino yang berlangsung hingga agustus mendatang.

"Menjadi warning yang keras bahwa pangan itu tidak boleh disepelekan tetapi harus kita segerakan terutama bagi para pebisnis atau pedagang besar sepe-

ti ISMI ini. Pertanian itu menarik dan menjanjikan karena dalam pengetahuan saya disaat krisis apapun bisnis yang paling bisa berjalan hanya bisnis pertanian," ujar Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo di Kota Makassar.

Saat ini, menurut Syahrul pemerintah sudah menyiapkan berbagai langkah strategis dalam menghadapi berbagai krisis nasional maupun global. Di antaranya memetakan lahan pertanian dengan kategori merah, hijau dan kuning sebagai langkah adaptasi dan antisipasi musim kering el nino.

"Pemetaan kita lakukan

baik dengan terjun langsung ke lapangan maupun memantau dengan citra satelit. Semua kita lakukan sebagai antisipasi agar pangan kita tetap terjaga. Karena itu dibutuhkan kolaborasi dengan semua pihak termasuk dengan para sodagar Indonesia," kata Syahrul.

Kementan, lanjut Syahrul, juga telah menyiapkan pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagai fasilitas kredit modal bagi para petani dan pelaku usaha tani. Bahkan pemerataan dilakukan hampir di semua Kabupaten dengan modal awal Rp 50 miliar untuk perlengkapan alsintan.

"KUR (Kredit Usaha

Rakyat) ini bisa digunakan untuk pompa air dan alat yang dibutuhkan 1 Kabupaten 50 miliar plus 100 miliar kurang lebih untuk menstimulasi hadirnya teknologi dan alsintan dalam mempercepat penanganan kekeringan dan krisis. Kredit KUR juga dapat digunakan untuk pembuatan pupuk organik dan modal usaha tani lainnya," jelas Syahrul.


Syahrul menambahkan, mulai saat ini semua daerah harus menyiapkan lumbung pangannya masing-masing agar dapat menyimpan stok pangan disaat semua negara menghadapi

krisis dunia. Lebih dari itu, agar petani terus melakukan produksi dengan memanfaatkan sisa air yang tersedia. "Semua daerah harus seperti itu dengan tetap memanfaatkan air di sumur resapan dan rehabilitasi jaringan irigasi tersier serta membagi pompa air di semua titik. Pemerintah akan menyiapkan KUR berikut asuransinya," jelas Syahrul.

Disisi lain, Syahrul juga meminta para penyuluh di Sulawesi Selatan menjadi pejuang dan garda terdepan meningkatkan produktivitas disaat musim kemarau panjang atau el nino 2023. @gro

Dokumentasi

**BIRO HUMAS DAN INFORMASI PUBLIK  
KEMANTAN**

Title	Nilai Ekspor Sumsel Mei 2023 Capai 580,44 Juta Dolar AS	 Kementerian Pertanian
Date	6 Juli 2023	
Media	Neraca	
Page	9	
Author	Ant	

## Nilai Ekspor Sumsel Mei 2023 Capai 580,44 Juta Dolar AS

### NERACA

Palembang - Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan nilai ekspor dari Sumatera Selatan (Sumsel) pada Mei 2023 mencapai 580,44 juta dolar Amerika Serikat (AS) atau naik 2,31 persen dibandingkan ekspor April 2023 senilai 567,31 juta dolar AS.

"Kenaikan tersebut disebabkan oleh peningkatan ekspor migas senilai 2,19 juta dolar AS (7,14 persen) dan ekspor nonmigas 10,20 juta dolar AS (1,94 persen)," kata Statistisi Ahli Madya Statistik Distribusi Sumsel Intan Yudistira, di Palembang, Selasa (4/7).


Ia menjelaskan peningkatan ekspor nonmigas terutama disebabkan oleh ekspor karet dan barang dari karet yang naik 27,46 juta dolar AS (34,18 persen), dan ekspor pulp dari kayu yang naik 10,18 juta dolar AS (7,76 persen).

Secara kumulatif, nilai ekspor Sumsel periode Januari hingga Mei 2023 mencapai 2.917,91 juta dolar AS atau naik 5,62 persen dibanding periode yang sama tahun 2022 senilai 2.762,73 juta dolar AS. Ekspor terbesar adalah Tiongkok sebesar 323,68 juta dolar AS, India sebesar 264,86 juta dolar AS, dan Malaysia sebesar 197,05 juta dolar AS.

BPS Sumsel juga mencatat nilai impor pada Mei 2023 mencapai 94,12 juta dolar AS atau naik 36,24 juta dolar AS (62,61 persen) dibanding April 2023, disebabkan oleh peningkatan impor migas 1,70 juta dolar AS (41,83 persen) dan impor nonmigas 4,55 juta dolar AS (64,18 persen).

Peningkatan impor nonmigas terutama disumbang oleh mesin dan peralatan mekanis dan bagiannya yang naik 27,65 juta dolar AS (166,73 persen). Dibandingkan periode yang sama tahun lalu, nilai impor Januari-Mei 2023 mengalami penurunan 9,75 juta dolar AS (3,05 persen), hal itu disebabkan oleh impor migas yang turun 31,86 juta dolar AS (56,89 persen).

Tiga negara pemasok barang impor terbesar Januari-Mei 2023 adalah Tiongkok 134,63 juta dolar AS (43,49 persen), Singapura 24,69 juta dolar AS (7,98 persen), dan Malaysia 23,19 juta dolar AS (7,49 persen). Nilai neraca perdagangan Provinsi Sumsel pada Mei 2023 mengalami surplus sebesar 486,29 juta dolar AS. ● ant

Title	Petani Dan Nelayan Dorong Berkoperasi untuk Tingkatkan Skala Ekonomi	 Kementerian Pertanian
Date	6 Juli 2023	
Media	Neraca	
Page	10	
Author	Neraca	

## Petani Dan Nelayan Dorong Berkoperasi untuk Tingkatkan Skala Ekonomi

### NERACA

Jakarta - Deputi Bidang Perkoperasian Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) Ahmad Zabadi mendorong petani berlahan sempit dan nelayan agar berkonsolidasi dalam wadah koperasi sehingga dapat meningkatkan nilai tambah dan memiliki skala ekonomi.

"Koperasi bisa menjadi jawaban berbagai keterbatasan di kalangan petani dan nelayan. Kita tahu bahwa petani yang menggambarkan pelaku usaha mikro dan kecil, saat ini memiliki keterbatasan ekonomi seperti lahan yang terbatas, SDM (Sumber Daya Manusia), akses pembiayaan, hingga kemampuan untuk menjangkau pasar," kata Deputi Bidang Perkoperasian KemenKopUKM Ahmad Zabadi.

Zabadi menjelaskan dengan segala keterbatasan yang dimiliki, koperasi menjadi pilihan rasional dalam mengembangkan usaha bagi para petani dan nelayan.

"Koperasi bisa berperan mengolah hasil panen, dan koperasi pula yang bergerak sebagai agregator dalam menghubungkan hasil produksi dengan market. Sehingga dengan demikian, bisnis yang dikelola memiliki skala ekonomi dan daya saing. Ini sekaligus meningkatkan produktivitasnya," ujar Zabadi.

Zabadi memberikan contoh Koperasi Al-Itifaq di Bandung, Jawa Barat, yang mampu mengkonsolidasikan petani berlahan sempit dengan rata-rata 50 hingga 100 meter, menjadi 1.200 hektare.

"Selain mengkonsolidasikan lahan sempit para petani, koperasi itu bermitra dengan offtaker akhir

seperti gerai ritel modern Superindo dan lainnya untuk memasarkan produk hasil petani," ucap Zabadi.

Di sektor perikanan, Zabadi menyebutkan pihaknya menerapkan program Solusi Nelayan (Solar Untuk Koperasi Nelayan) untuk membantu para nelayan yang tergabung dalam koperasi, agar dapat lebih mudah menjangkau solar bersubsidi.

"Kita tahu di sektor perikanan, 60 persen biaya yang dikeluarkan ada pada bahan bakarnya. Para nelayan harus membeli harga bahan bakar solar jauh dari harga subsidi yang ditentukan. Kami upayakan 250 desa kampung nelayan untuk dapat difasilitasi SP-BU nelayan kedepannya," kata Zabadi.

Direktur Eksekutif Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute Tungkot Sipayung mengatakan, petani dan koperasi sawit merupakan penggerak ekonomi pedesaan yang tercatat signifikan mengurangi kemiskinan dan pengangguran di pedesaan.

"Mengapa petani sawit memerlukan koperasi? Karena skala usaha perkebunan sawit rakyat relatif kecil dan menyebar, jalan sendiri-sendiri memiliki posisi tawar lemah, serta secara lokal berada dalam dua kekuatan monopsonistis dan monopolistis," kata Tungkot.

Tungkot juga menekankan pentingnya para petani sawit untuk memiliki organisasi ekonomi yang mengintegrasikan hulu-hilir sehingga dapat mencapai skala ekonomi. Dengan begitu, para petani sawit rakyat yang hanya bergerak pada on farm dapat memiliki nilai tambah pada mata rantai bisnis sawit.

Senada dengan Tungkot, CEO Rumah Kese-


jahteraan Pendi Yusup mengungkapkan, dengan berkoperasi para petani dan nelayan akan merasakan manfaat ekonomi yang lebih ketimbang berjalan sendiri-sendiri.

"Koperasi bisa menjawab kebutuhan anggota, dalam konteks petani mampu memenuhi kebutuhannya. Selain itu dengan mengkonsolidasikan diri maka akan tercapai skala ekoomi, sehingga biaya yang dikeluarkan lebih murah," kata Pendi Yusup.

Sebelumnya dalam forum The 28th ASEAN Center for Agricultural Cooperative Development (ACEDAC) Board Meeting dan 23rd ASEAN Working Group for Agricultural Cooperative (ASWGAC), Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga KemenKopUKM Luhur Pradjarto pun menyatakan bahwa KemenkopUKM akan mendorong penguatan koperasi pertanian di kawasan regional ASEAN sebagaimana pemerintah saat ini sedang fokus mengembangkan koperasi pertanian modern.

Luhur pun berharap, dengan semakin membaiknya kondisi negara kawasan ASEAN dari efek pandemi, kegiatan dapat berjalan. "Pertemuan juga menghadirkan perwakilan dari JA Zenchu, Agriterra, dan JICA yang menyampaikan berbagai program dukungan yang telah dilaksanakan dalam kerja sama pengembangan koperasi pertanian di negara-negara ASEAN," kata Luhur.

Selain itu, pada November 2022, KemenkopUKM bekerja sama dengan ASEAN Sekretariat dan Pendanaan dari Ministry of Fishery and Forestry, Japan, akan melaksanakan Advisory Committee Meeting di

Title	Kementan Siapkan KUR Pertanian Rp 50 Miliar Per Kabupaten Kota	 Kementerian Pertanian
Date	6 Juli 2023	
Media	Banten Pos	
Page	2	
Author	DZH/ANT	

## Kementan Siapkan KUR Pertanian Rp50 Miliar per Kabupaten/Kota

MAKASSAR, BANPOS - Kementerian Pertanian (Kementan) melalui kerja sama pihak perbankan, menyiapkan pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagai fasilitas kredit modal bagi para petani dan pelaku usaha tani senilai Rp50 miliar per kabupaten/kota.

Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo, mengemukakan bahwa pemerataan dilakukan hampir di semua kabupaten dengan modal awal Rp50 miliar, untuk perlengkapan alsintan.

"Kredit KUR ini bisa digunakan untuk pompa air dan alat yang dibutuhkan pada satu kabupaten, sekitar Rp50-100 miliar untuk mensubtilisasi hadirnya teknologi dan alsintan dalam mempercepat pe-

nanganan kekeringan dan krisis," ujar Syahrul, Rabu (5/7).

Selain itu, kredit KUR juga dapat digunakan untuk pembuatan pupuk organik dan modal usaha tani lainnya dalam mendukung peningkatan pertanian. "Pemerintah akan menyiapkan KUR berikut asuransinya," tambah dia.

Pria yang akrab disapa SYL itu menambahkan, mulai saat ini semua daerah harus menyiapkan lumbung pangannya masing-masing, agar dapat menyimpan stok pangan di saat semua negara menghadapi krisis dunia.

Lebih dari itu, SYL meminta agar petani terus melakukan produksi dengan memanfaatkan sisa air yang tersedia. Semua daerah diminta

harus mengoptimalkan air yang tersisa dengan tetap memanfaatkan air di sumur resapan dan rehabilitasi jaringan irigasi tersier serta membagi pompa air di semua titik.

Terkait penyaluran KUR Pertanian oleh perbankan, PT BRI juga memprioritaskan penyaluran KUR Pertanian sebagai salah satu wujud mendukung ketahanan pangan nasional, khususnya pada wilayah Regional Office (RO) Makassar.

Ruang lingkup BRI RO Makassar meliputi Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, dan Ambon Maluku.

"Penyaluran KUR Pertanian sekitar 60 persen dari total penyaluran KUR Mikro, karena memang wilayah pertanian kita banyak," ujar

CEO BRI Regional Makassar Rahman Arif.

BRI RO Makassar merilis penyaluran KUR Mikro sejak Maret hingga 22 Juni 2023 sebesar Rp5,57 triliun, sementara penyaluran KUR Super Mikro sebanyak Rp26,7 miliar sehingga total penyaluran KUR sebanyak Rp5,65 triliun.

Rahman Arif menjelaskan bahwa KUR pertanian diperuntukkan bagi para petani atau berbagai pihak yang mengerjakan sektor pertanian.

Kredit usaha ini untuk membantu permodalan para petani dalam mengelola sawahnya, seperti pembibitan dan pemupukan sehingga dalam proses produksinya bisa menghasilkan hasil tani yang berkualitas sesuai harapan. (DZH/ANT)

